

340.57
CAH
2 21

**KEDUDUKAN SENTANA NYEBURIN DALAM PERKAWINAN
NYENTANA MENURUT HUKUM ADAT WARIS BALI
(Setelah Berlakunya Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)**



TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-2**

Magister Kenotariatan

Oleh :

INDAH DUGI CAHYONO

B4B 000145

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
SEPTEMBER
2002**

TESIS

KEDUDUKAN SENTANA NYEBURIN DALAM PERKAWINAN

NYENTANA MENURUT HUKUM ADAT WARIS BALI

(Setelah Berlakunya Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)

Disusun Oleh :

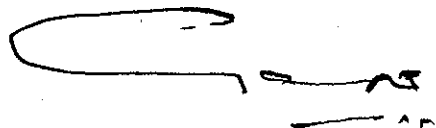
INDAH DUGI CAHYONO

B4B 000145

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
pada tanggal 23 September 2002
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

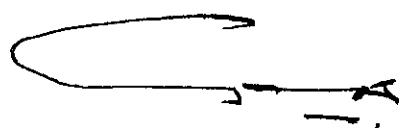
Menyetujui

Pembimbing



(PROF. IGN. SUGANGGA, SH)

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan



(PROF. IGN. SUGANGGA, SH)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan. Sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 23 September 2002

Yang menyatakan,



INDAH DUGI CAHYONO

RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS

Nama lengkap : INDAH DUGI CAHYONO
Tempat & Tanggal lahir : Denpasar, 10 September 1968
Status : Menikah
Alamat Rumah : Jl. Danau Pigi No. 10
Perumahan Bumi Pagutan Permai
Mataram – NTB
Telp. (0370) 626616

PENDIDIKAN

1. SD 2 Negeri Sumerta Denpasar
Lulus dan berijazah tahun 1982
2. SMP Wira Bhakti Denpasar
Lulus dan berijazah tahun 1985
3. SLUA I Saraswati Denpasar
Lulus dan berijazah tahun 1988
4. Universitas Warmadewa Denpasar
Fakultas Hukum
Lulus dan berijazah tahun 1995

5. Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang
Angkatan Tahun 2000 - sekarang

PENGALAMAN KERJA

- Direktur CV. KHARISMA HARMONIKA
Tahun 1995 - sekarang

ORGANISASI

- Biro Hukum GMNI Tingkat I Nusa Tenggara Barat
Tahun 2001 - sekarang
- Ketua Harian Pengda Taekwondo Tingkat I Nusa Tenggara Barat
Tahun 2000 - sekarang
- Biro Hukum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Tingkat I Nusa Tenggara Barat
Tahun 2000 – sekarang
- Wakil Ketua Pemuda Demokrat Indonesia Tingkat I Nusa Tenggara Barat
Tahun 1999 - sekarang
- Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Mataram
Tahun 1996 - sekarang

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 23 September 2002

(INDAH DUGI CAHYONO)

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, dan atas berkat rahmat-Nya yang dilimpahkan kepada penulis sehingga penulis dapat menyusun Karya Ilmiah dalam bentuk Tesis dengan judul **“Kedudukan Sentana Nyeburin Dalam Perkawinan Nyentana Menurut Hukum Adat Waris Bali (Setelah Berlakunya Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974)”**.

Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai jenjang studi S-2 pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam kesempatan ini penulis menghaturkan beribu-ribu rasa terima kasih dan rasa hormat yang setinggi-tingginya atas perhatiannya serta bimbingan kepada berbagai pihak yang memberi kesempatan dan bantuan kepada penulis terutama yang terhormat :

1. Bapak Prof. Ir. Eko Budihardjo, MSc selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang
2. Bapak Prof. Dr. Suharyo Hadisaputra, dr, Sp, PD(K) selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro
3. Bapak Prof. I.G.N. Sugangga, SH., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro dan Pembimbing dalam penulisan Tesis ini.
4. Bapak R. Suharto, SH. M.Hum., selaku Sekretaris dan penguji pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

5. Ibu Hj. Sri Sudaryatmi, S.H., M.Hum selaku penguji pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
6. Bapak Yunanto, SH.MH., selaku penguji pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
7. Bapak Sukirno, S.H., M.Hum. selaku penguji pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
8. Ibu Irma Setyowati, S.H., (Alm.), selaku reviewer pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
9. Para Guru Besar dan Staff Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang secara Profesional memberikan ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan.
10. Para responden yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu dalam memberikan pendapatnya.
11. Kepala Perpustakaan Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang beserta para petugasnya.
12. Staf Pengajaran Notariat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Secara khusus Tesis ini penulis persembahkan untuk semua keluarga yang dalam hal ini tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, dan diiringi ucapan terima kasih yang sangat mendalam terutama kepada **MARDIANA, SH** sebagai istri, kekasih, teman, sahabat, guru dan motivator yang tiada bosan-bosannya dan penuh pengertian serta kasih yang tulus serta kesabaran, yang selalu setia menjadi teman diskusi dalam penulisan Tesis ini. Tidak lupa penulis ucapkan kepada anak-anakku

DIAH CHARISMA PUTRI dan **RIVANDI YUSUF NUGRAHA** yang aku cintai dan sayangi yang telah tulus ikhlas dan setia menanti serta memberikan dukungan doa yang tiada hentinya.

Sebagai manusia penulis menyadari akan kekurangan-kekurangan yang ada dalam penyusunan Tesis ini dan dapat dikatakan masih jauh dari sempurna, baik isi maupun bentuknya. Untuk itu dengan kerendahan hati penulis akan menerima segala kritikan dan saran dari semua pihak demi sempurnanya Tesis ini.

Diharapkan dari semua materi dapat memperkaya khasanah dan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi Hukum Adat.

Semarang, 23 September 2002

INDAH DUGI CAHYONO

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
RIWAYAT HIDUP	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAKSI	xii
 I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	6
1.3. Batasan Masalah	6
1.4. Tujuan Penelitian	8
1.5. Manfaat Penelitian	8
1.6. Sistematika Penulisan	9
 II TINJAUAN PUSTAKA	
TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN	
2.1. Pengertian Perkawinan	12
2.2. Bentuk-bentuk Perkawinan	17
2.3. Perkawinan Adat Bali Menurut Agama Hindu	23
2.3.1. Bentuk perkawinan biasa	25
2.3.2. Perkawinan Nyentana	28
2.3.3. Sebab-sebab Timbulnya Perkawinan Nyentana	30
2.4. Syarat-syarat dan Sahnya Perkawinan	32
2.4.1. Syarat-syarat Perkawinan	35
2.4.2. Sahnya Perkawinan	39
2.5. Putusnya Perkawinan	41
2.6. Tinjauan Tentang Pewarisan	44
2.7. Kedudukan Sentana Nyeburin Dalam Hukum Adat Waris	55
2.8. Pandangan Masyarakat Terhadap Perkawinan Nyentana	61
2.9. Hipotesis	63
 III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1. Metode Pendekatan	65
3.2. Jenis Penelitian	65
3.3. Sumber Data	66
3.3.1. Data Primer	66
3.3.2. Data Sekunder	66

3.4. Lokasi Penelitian	67
3.5. Teknik Pengumpulan Data	68
3.5.1. Studi Kepustakaan.....	68
3.5.2. Survei Lapangan	68
3.6. Teknik Pengecekan Kebenaran Data	69
3.7. Teknik Pengolahan dan Analisa Data	69
IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1. Hasil Penelitian	70
4.1.1. Mengenai Sentana Nyeburin yang tetap tinggal di rumah almarhum istrinya (Kasus I)	71
4.1.1.1. Kasus Sentana Nyeburin yang tetap tinggal di rumah almarhum istrinya di Banjar Sigaran	71
4.1.1.2. Kasus Sentana Nyeburin yang tetap tinggal Di rumah almarhum istrinya di Banjar Bendul	72
4.1.2. Mengenai Sentana Nyeburin yang pulang kembali ke rumah asalnya/Mulih Daha(Kasus II)	75
4.1.2.1. Kasus Sentana Nyeburin yang pulang kembali ke rumah asalanya (Mulih Daha) di Banjar Pande	75
4.1.2.2. Kasus Sentana Nyeburin yang pulang kembali ke rumah asalanya (Mulih Daha) di Banjar Ngis Kaja	78
4.2. Analisa Terhadap Hasil Penelitian	81
4.2.1. Kedudukan waris Sentana Nyeburin yang tinggal di rumah almarhum istrinya	81
4.2.2. Kedudukan waris Sentana Nyeburin yang pulang (mulih daha) ke rumah asalanya	84
V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	86
5.2. Saran-saran	87
5.3. Ringkasan	88

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- A. Putusan Perceraian No. 14/Pdt.G/2002/PN. TBN
- B. Surat Keterangan Kawin Nomor : 64 /Pem/DB/III/2002
- C. Awig-awig Desa Adat Jegu
- D. Kutipan Akta Perkawinan (Nyentana) Nomor : 1509/WNI/2002

ABSTRAKSI

Bentuk perkawinan dan sistim kekeluargaan mempengaruhi dari pada sistim pewarisan. Pada masyarakat Hukum Adat di Indonesia dikenal adanya 3 (tiga) macam sistim kekeluargaan, yaitu :

1. Sistim kekeluargaan patrilineal yaitu suatu pertalian darah yang mengutamakan pada garis keturunan bapak.
2. Sistim kekeluargaan matrilineal yaitu suatu pertalian darah yang mengutamakan pada garis keturunan ibu.
3. Sistim kekeluargaan parental, dalam pertalian darah seperti ini kekerabatan bapak ataupun kekerabatan ibu sama-sama memiliki peranan yang penting.

Di Bali dianut sistim kekeluargaan patrilineal, maka seorang anak laki-laki (purusa) merupakan harapan masa depan keluarga selaku pelanjut keturunan. Jika tidak ada keturunan laki-laki tetapi yang ada hanya keturunan perempuan, maka anak perempuan ini dapat diangkat sebagai *Sentana Rajeg* (status purusa), yang perkawinannya dengan perkawinan *Nyentana/Keceburin*.

Dalam perkawinan Nyeburin ini laki-laki yang telah berubah status menjadi perempuan (predana) dapat dikatakan Ninggal Kedaton sehingga kehilangan hak untuk mewaris di rumah asalnya.

Bentuk perkawinan menurut Hukum Adat di Bali dikenal 2 (dua) macam bentuk perkawinan, yaitu perkawinan biasa dan perkawinan Nyentana. Bentuk perkawinan Nyentana ini merupakan kebalikan bentuk dari perkawinan biasa, dimana si istrilah yang berstatus sebagai laki-laki (purusa), sedangkan si suami berstatus perempuan (predana). Jadi si suami yang mengikuti / masuk dalam rumpun keluarga si istri.

Dalam putusnya perkawinan Nyentana karena kematian si istri, biasanya si suami (Sentana Nyeburin) akan tetap tinggal di rumah almarhum istrinya. Jika putusnya perkawinan Nyentana karena perceraian, maka si suami (Sentana Nyeburin) akan kembali ke rumah asalnya. Mengenai hak untuk mewaris dari Sentana Nyeburin baik yang tetap tinggal di rumah almarhum istrinya maupun yang pulang ke rumah asalnya akan dibatasi mulai setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975.

Menurut Pasal 38 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1975 Perkawinan dapat putus karena :

- a) Kematian
- b) Perceraian dan
- c) Keputusan Pengadilan

Sedangkan menurut Hukum Adat Bali harta dalam perkawinan terdiri : a) harta guna kaya ; b) harta jiwa dana ; c) harta tatadan ; d) harta druwe gabro.

ABSTRACT

Type of marriage and a family system will influence the inheritance system. For society of traditional law in Indonesia there is recognize three type of family system :

- 1) Patrilineal family system, that is a blood relationship where father descent line is superior .
- 2) Matrilineal family system, that is a blood relationship where mother descent line is superior .
- 3) Parental family system, that is a blood relationship where mother descent line and father descent line have an equal role.

In Bali follow patrilineal family system, so boys (*purusa*) will be a family' hope in the future will continue their family descent. If they do not have a boy and only have a girl will be raised as *Sentana Rajeg* (*statua purusa*) which the marriage with the *Nyetana* /*Nyeburin* marriage .

In the *Nyeburin* marriage, boy who has already change his status become a girl (*prenada*) can be said *Ninggal Kedaton* and will lost his right to inherit at his own parents house .

There is to types of marriage according to the traditional law at Bali, there are a common marriage and the *nyetana* marriage . Types of *Nyetana* marriage is an opposite of the common marriage, where the wife has status as a man (*purusa*) while the husband has status as a woman (*predana*) . So the husband will follow the wife or enter the wife family group.

In case of *Nyetana* marriage cut off that is caused by the wife's death, the husband usually will still stay at the house of his parent's wife. If the *Nyetana* marriage cut off is caused by divorce, the husband (*sentana nyeburin*) will go back to his own parent's house. So, the right to inherit of *Sentana nyeburin* who still stays at wife's house or go back to his own parent house will be limited since *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974* (Marriage Law Number 1 Year 1974) and *Peraturan Pemerintah* (Indonesian Government regulation Number 9 Year 1975) be effective

Following Pasal 38 Marriage Law Number 1 Year 1975, Marriage cut off is caused by :

- a. Deathly
- b. Divorce
- c. Judge Decision

But according to the Bali traditional law of marriage existing a). *harta guna kaya*; b). *harta jiwa dana*; c). *harta tata dan* d). *harta drume gabro*.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat Indonesia, sebab itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing.

Dalam kehidupan manusia di dunia ini, yang berlainan jenis kelaminnya (laki-laki dan perempuan) secara alamiah mempunyai daya tarik antara yang satu dengan yang lainnya untuk dapat hidup bersama, atau secara logis dapat dikatakan untuk membentuk suatu ikatan lahir dan batin dengan tujuan menciptakan suatu keluarga/rumah tangga yang rukun, bahagia, sejahtera dan abadi.¹

Oleh karena itu perkawinan merupakan suatu perbuatan yang harus dilaksanakan sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, baik norma-norma agama maupun norma hukum. Dan keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang menentukan proses yang harus dilalui beserta ketentuan-ketentuan yang menentukan akibat hukumnya dinamakan dengan hukum perkawinan.²

¹ Djoko Prakoso dan I Ketut Murdika, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 1.

² Djaren Saragih, *Hukum Perkawinan Adat dan Undang-undang Tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaannya (UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975)*, Tarsito, Bandung, 1980, hlm. 7.

Dengan demikian jelaslah bahwa perkawinan bukan hanya sekedar hubungan biologis yang mendapatkan legalitasnya melalui hukum sehingga mereka dapat secara leluasa memenuhi kebutuhan mereka. Disamping itu kalau perkawinan dihubungkan dengan upacara keagamaan sehingga menyebabkan kedudukan lembaga perkawinan sebagai lembaga yang tidak terpisah dari hukum agama, dimana syarat-syaratnya pun harus memenuhi ketentuan hukum agama.³

Dari pandangan tersebut, maka dapatlah dikatakan bahwa pada hakekatnya perkawinan itu mempunyai tujuan untuk menciptakan suatu keluarga yang rukun, bahagia, sejahtera dan abadi, yang dapat diharapkan dari adanya suatu perkawinan adalah anak untuk meneruskan keturunan dari keluarganya. Seorang anak dalam keluarga sangat mempunyai arti penting bagi keluarganya, karena anaklah dalam keluarga penerus hak dan kewajiban orang tuanya, jika suatu saat orang tuanya sudah tidak mampu/sudah tua sehingga dalam hal ini orang tua dengan anak mempunyai hubungan timbal balik dan dapat saling membantu. Telah diketahui dalam kehidupan di masyarakat sebagian besar dalam suatu keluarga tentu saja mengharapkan lahirnya seorang anak dari perkawinannya.

Dalam masyarakat Bali sering kita jumpai apabila pasangan suami istri tidak mempunyai keturunan, sebagai upaya untuk dapat memperoleh keturunan dari keluarga ini adalah dengan melakukan pengangkatan anak.

³ Anak Agung Ngurah Gede Dirksen, *Seri Hukum Perdata Hukum Perkawinan dan Permasalahannya*, Setia Kawan, Denpasar, 1986, hlm. 167.

Di Bali masyarakatnya menganut sistem kekeluargaan patrilineal (garis keturunan bapak). Yang dimaksud dengan masyarakat hukum Patrilineal adalah :

1. Masyarakat hukum yang berdasarkan atas atau menarik garis keturunan hanya melalui garis bapak (lak-laki) saja.
2. Semua yang termasuk keluarga dalam arti ikatan hukum kekeluargaan adalah garis bapak/keturunan dari bapak.
3. Dalam perkawinan istri masuk ke dalam keluarga bapak dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah menjadi keluarga bapak.
4. Istri putus hubungan hukum dengan keluarga asalnya.
5. Hak dan kewajiban baik dilihat dari hukum perkawinan, keluarga dan hukum waris terletak di tangan garis keturunan keluarga bapak, termasuk dalam hubungannya dalam masyarakat.⁴

Dimana penerus keturunan ada di pihak laki-laki yang disebut *Purusa*, sedangkan perempuan disebut *Pradana*. Konsep *Purusa* dan *Pradana* bermakna jiwa dan raga, jiwa itu menghidupi, sementara raga dihidupi.⁵

Berdasarkan sistem kekeluargaan *Purusa* tersebut, maka kedudukan anak (keturunan) adalah sangat penting. Oleh karena itu anak laki-laki lah yang disebut dengan sentana. Sebagai sentana akan timbul hak dan kewajiban, hak dan

⁴ I.G.N. Sugangga, *Hukum Adat Waris Pada Masyarakat Hukum Adat yang Bersistem Patrilineal di Indonesia*, Semarang, 1988, hlm. 15 –16.

⁵ Bali Post, 20 April 2002, hlm. 9

kewajiban inilah yang harus dipikul oleh anak laki-laki baik terhadap orang tua, keluarga maupun masyarakat.

Dengan dianutnya sistem kebapaan, maka hal utama yang menonjol adalah anak laki-laki. Anak laki-laki akan meneruskan kehidupan/keturunan keluarga itu, sedangkan anak perempuan tidak begitu adanya. Dalam pengertian ini, sedemikian juga disebut anak sentana/istilah mana berasal dari kata sentana yang berarti pelanjut keturunan.⁶

Mengenai kata sentana ini dikenal pula dalam penyebutan terhadap keadaan selain di atas seperti "Sentana Rajeg" yaitu anak perempuan yang ditingkatkan kedudukannya menjadi anak sentana, berarti ia dianggap telah beralih status dari status perempuan ke status laki-laki. Dalam peningkatan status ini melalui upacara *Peperasan Sentana Rajeg*, dan selanjutnya dilakukan pengumuman di masyarakat yang dipimpin oleh Pengurus Adat yang dikenal dengan istilah Bendesa atau Kelihan Adat.

Anak perempuan yang telah menjadi Sentana Rajeg ini bisa menjadi ahli waris dari orang tuanya, karena kedudukan hukumnya dari predana menjadi purusa.⁷

Perkawinan Nyentana adalah merupakan kebalikan dari pada perkawinan biasa yaitu pihak pria lah yang akan beralih tempat ke tempat si perempuan serta

⁶ VE. Korn, *Hukum Adat Kekeluargaan di Bali*, Terjemahaan I Gde Wayan Pangkat, Biro Dokumentasi & Publikasi FH Unud, Denpasar, 1978, hlm. 29 – 30.

⁷ I Gusti Ketut Kaler, *Butir-butir Tercecer Tentang Adat Bali*, Jilid 2, Bali Agung, Denpasar, 1988, hlm. 61.

segala upacara dilakukan pada tempat si perempuan begitu juga anak-anak yang lahir pada perkawinan nyetana ini akan menjadi anggota keluarga si perempuan, akan tetapi harus juga memenuhi ketentuan hukum agama Hindu di Bali.

Dari sekian banyak perkawinan Nyentana di daerah Tingkat II Kabupaten Tabanan Propinsi Bali, tidak mustahil terjadinya putusnya perkawinan tersebut.

Dalam Pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.

Menurut Yulius S. dalam buku Kamus Baru Bahasa Indonesia, menyatakan bahwa perceraian berasal dari kata cerai yang berarti pisah, menceraikan, memisahkan, cerai-berai berarti bubar.⁸

Bila perkawinan Nyentana itu putus karena kematian si istri yang berstatus sebagai Sentana Rajeg, maka si suami dapat saja menetap/tetap tinggal di rumah almarhum istrinya, atau si suami kembali ke rumah asalnya. Dan jika putusnya perkawinan Nyentana karena perceraian atau karena putusan pengadilan, maka si suami biasanya kembali ke rumah asalnya.

Mengenai kedudukan atau status dari Sentana Nyeburin baik itu yang menetap di rumah almarhum istrinya maupun yang kembali ke rumah asalnya menurut Undang-undang Perkawinan tidak ada ketentuan yang mengaturnya.

⁸ Yulius S, *et. al.*, *Kamus Baru Bahasa Indonesia*, Usaha Baru, Surabaya, 1980, hlm. 38.

Dengan demikian maka kedudukan atau status Sentana Nyeburin akan dibahas menurut hukum adat waris yang berlaku di Bali.

1.2. Perumusan Masalah

- 1.2.1. Bagaimanakah kedudukan waris Sentana Nyeburin (laki-laki) yang melakukan perkawinan nyentana apabila istrinya meninggal dunia, dan dia tetap tinggal di rumah almarhum istrinya ?
- 1.2.2. Bagaimanakah kedudukan waris Sentana Nyeburin (laki-laki) yang melakukan perkawinan Nyentana yang kembali ke rumah asalnya ?

1.3. Batasan Masalah

Pembatasan masalah ialah usaha untuk menetapkan batasan-batasan dari masalah penelitian yang akan diteliti. Batasan masalah ini berguna bagi kita untuk mengidentifikasi faktor mana saja yang termasuk dalam ruang lingkup masalah penelitian, dan faktor mana yang tidak termasuk dalam ruang lingkup masalah penelitian.⁹

Dengan tidak adanya hukum waris nasional yang mengatur tentang kedudukan sentana nyeburin itu, maka pengaturannya akan ditentukan berdasarkan hukum adat waris, dalam hal ini hukum adat waris Bali yang berlaku di Desa Adat Jegu, Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan.

⁹ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2001, Cet. Ke IV, hlm. 23.

Maka batasan pembahasan terhadap pokok permasalahan diatas adalah meliputi hak dan kewajiban dari Sentana Nyeburin, meliputi hak dan kewajibannya terhadap :

1. Harta warisan yang merupakan peninggalan dari almarhum si istri (Purusa), dalam hal ini Sentana Nyeburin (Predana) tetap berada di rumah almarhum istrinya, baik harta warisan materiil maupun yang inmateriil.
2. Harta warisan materiil dan inmateriil di rumah asalnya, apabila Sentana Nyeburin pulang ke rumah asalnya karena putusnya perkawinan (mulih daha).

Dalam penelitian ini, penulis akan membatasi permasalahan dari proses terjadinya perkawinan Nyentana sampai putusnya perkawinan tersebut, baik karena kematian istri (purusa) ataupun karena perceraian yang telah dilakukan di depan sidang pengadilan sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Permasalahan yang pertama akan dibahas adalah hak dan kewajiban dari sentana nyeburin yang tetap berada di rumah almarhum istrinya, bila istri meninggal dunia. Permasalahan kedua yang dibahas adalah hak serta kewajiban daripada sentana nyeburin yang kembali ke rumah asalnya bila perkawinannya putus.

Kedua permasalahan pokok tersebut akan dibatasi atau disesuaikan setelah mulai berlakunya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Hukum waris itu berkaitan erat dengan hukum kekeluargaan dan juga hukum perkawinan, maka dengan pembahasan nantinya akan menyangkut pula mengenai bentuk-bentuk perkawinan yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan.

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dimaksudkan :

Secara umum memberi gambaran tentang perkawinan dan sistem pewarisan menurut hukum adat dalam masyarakat, yang disesuaikan pelaksanaannya dengan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Sedangkan tujuan secara khusus adalah :

1. Untuk mengetahui kedudukan waris Sentana Nyeburin yang tetap berada di rumah almarhum istrinya.
2. Untuk mengetahui kedudukan waris Sentana Nyeburin yang kembali ke rumah asalnya, setelah perkawinannya putus.

1.5. Manfaat Penelitian

Sehubungan dengan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis akan menambah pengetahuan penulis tentang hak dan kewajiban dari sentana nyeburin semenjak terjadinya perkawinan Nyentana hingga perkawinan itu putus.

2. Secara praktis dapat memberikan sumbangan dan berfungsi bagi masyarakat adat Bali dalam hal yang berkaitan dengan perkawinan Nyentana, serta menambah khasanah dalam bidang ilmu pengetahuan hukum khususnya Hukum Adat.

1.6. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian mengenai Kedudukan Sentana Nyeburin dalam Perkawinan Nyentana Menurut Hukum Adat Waris Bali (Setelah Berlakunya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974), disusun suatu tulisan yang tersusun secara sistematis meliputi beberapa bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan yang meliputi, latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Mengenai tinjauan umum tentang perkawinan yang meliputi : pengertian perkawinan, bentuk-bentuk perkawinan, syarat-syarat perkawinan. Bentuk perkawinan di Bali, perkawinan Nyentana, sebab-sebab timbulnya perkawinan Nyentana, syarat-syarat perkawinan Nyentana. Kedudukan Sentana Nyeburin dalam hukum adat waris, kedudukan Sentana Nyeburin yang berada di

rumah istri dan kedudukan Sentana Nyeburin yang kembali ke rumah asalnya (mulih daha)

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penyusunan tesis ini menggunakan metodologi penelitian. Adapun metodologi yang digunakan adalah sebagai berikut : metode pendekatan yang meliputi pendekatan yuridis dan pendekatan sosiologis. Sumber data yang diperoleh yaitu melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, serta menggunakan teknik pengumpulan data berbentuk studi kepustakaan dan survei lapangan. Selanjutnya semua data itu dilakukan pengecekan akan kebenaran dengan menggunakan tehnik triangulasi kemudian data tersebut diolah secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif analitis.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Akan membicarakan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi ketentuan-ketentuan/peraturan-peraturan adat yang tertulis (Awig-awig) maupun norma-norma yang tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat pada umumnya, khususnya pada masyarakat Bali di Kabupaten Tabanan, juga mengenai kedudukan hak waris dari seorang laki-laki yang melakukan perkawinan Nyentana baik di rumah istrinya, maupun pada rumah asalnya.

BAB V : PENUTUP

Penutup ini memuat kesimpulan dan saran-saran serta ringkasan dari hasil penelitian dan akan diakhiri dengan lampiran-lampiran yang terkait dengan hasil penelitian yang ditemukan di lapangan yang dipergunakan sebagai pendukung pembahasan atas hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

2.1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah merupakan saat yang penting artinya di dalam perjalanan hidup seseorang, karena mulai saat itu mereka mulai menginjakkan masa hidup baru sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga dengan suatu keharusan untuk memenuhi segala kewajiban yang timbul dari perkawinan itu.

Peristiwa ini mempunyai beberapa aspek antara lain : aspek sosial, aspek agama dan aspek hukum.

Ditinjau dari aspek sosial, perkawinan merupakan suatu dasar bagi terbentuknya suatu keluarga. Sebagaimana kita ketahui, bahwa keluarga adalah merupakan unit terkecil dalam suatu masyarakat.

Sebagai suatu lembaga perkawinan itu telah ada sejak kelahiran yang pertama.¹ Disamping itu dengan adanya perkawinan akan membawa akibat perubahan status sosial bagi yang bersangkutan dalam masyarakat, yakni perubahan status dari hidup sendiri menjadi hidup bersama dalam suatu keluarga.

Ditinjau dari segi agama, perkawinan adalah suatu lembaga yang suci dan mulia. Dikatakan suci karena dengan adanya perkawinan akan dapat

¹ Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama*, Santika Darma, Bandung, hlm. 7.

menghindarkan manusia dari . hak-hak yang tidak diinginkan seperti misalnya : perzinahan dan pemerkosaan. Pengertian ini dapat kita lihat di dalam Adyaya IX, 25 “Bahwa dengan lembaga perkawinan itu dimaksudkan untuk mengatur hubungan sex yang layak, yaitu suatu hubungan biologis yang diperlukan dalam kehidupan seseorang sebagai suami istri.”²

Dikatakan mulia karena perkawinan akan membuahkan keturunan yang dapat melanjutkan keturunan dan menghindari manusia dari kepunahan. Disamping hal tersebut dapat dilihat, bahwa setiap dilangsungkannya perkawinan selalu disertai dengan upacara-upacara agama dan bahkan upacara keagamaan inilah yang paling menentukan untuk sahnya suatu perkawinan tersebut.

Ditinjau dari aspek hukum, perkawinan adalah merupakan suatu perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara para terkait (suami istri). Sebagai akibat dari aspek yang terkait dalam lembaga perkawinan tersebut timbul pengertian perkawinan yang berbeda-beda tergantung dari segi mana akan meninjaunya.

Subekti misalnya mendefinisikan bahwa “Perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.”³

² Gde. Pudja, Pengantar *Tentang Perkawinan Menurut Hukum Hindu*, Mayasari, Cet. II, 1975 (selanjutnya disebut Gde. Pudja II), hlm. 17.

³ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, hlm. 20.

R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safiodin, memberikan definisi perkawinan : “Perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama yang diakui oleh negara”.⁴

Kemudian Surojo Wignjodipuro memberikan arti :

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab perkawinan tidak hanya menyangkut wanita dan pria bekal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing.⁵

Pendapat demikian ini juga dikemukakan oleh B. Ter Haar Bzn, dimana beliau memberikan pengertian perkawinan menurut hukum adat adalah : “Urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan derajat dan urusan pribadi.”⁶

Selanjutnya istilah perkawinan sebagaimana menurut Kitab Suci Veda dan Susastra Hindu lainnya adalah untuk mewujudkan kebahagiaan bersama lahir dan batin termasuk pula dalam pengertian memperoleh keturunan, yang Suputra (anak-anak dan cucu-cucu) sebagai penerus kehidupan keluarga.⁷

Rumusan tadi jelas bahwa terwujudnya keluarga bahagia merupakan tujuan pokok perkawinan. Bahagia yang dimaksud adalah bahagia lahir dan batin. Kebahagiaan dalam keluarga tidak saja menumpuknya harta benda, tidak

⁴ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safiodin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni Bandung, 1979, hlm. 31.

⁵ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Azas-azas*, Alumni Bandung, 1979, hal. 46.

⁶ Ter Haar Bzn, *Azas-azas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. IV, 1979, hlm. 187.

⁷ I Made Titib, *Perkawinan dan Kehidupan Keluarga Menurut Kitab Suci Veda*, Paramita, Surabaya, 1996, hlm. 4.

saja terpenuhinya hubungan seks, tetapi terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani yang wajar.

Jadi perkawinan itu bukan semata-mata untuk mengadakan hubungan seks saja, melainkan lebih dari itu agar bisa menghasilkan keturunan dan bisa diajak bekerja sama untuk melaksanakan dharma agama dan dharma negara. Perkawinan atau vivaha bagi masyarakat Hindu mempunyai arti dan kedudukan yang khusus di dalam kehidupan manusia yaitu awal jenjang grhastha. Di dalam Kitab Manava Dharmasastra dijelaskan bahwa perkawinan itu bersifat religius (sakral) dan wajib hukumnya. Perkawinan (grhastha) sangat dimuliakan karena bisa memberi peluang atau kesempatan kepada anak/keturunan untuk melebur dosa-dosa leluhurnya agar bisa menjelma atau menitis kembali ke dunia.

Perkawinan diharapkan dapat melahirkan keturunan/anak. Anak inilah yang nantinya yang bertugas untuk melakukan Śraddha (Pitra Yadña), untuk menyelamatkan dan mendoakan agar leluhurnya mendapatkan jalan yang terang. Anak/keturunan merupakan kalanjutan dari siklus kehidupan keluarga, selain itu anak/keturunan adalah pelita kehidupan. Anak yang lahir dari keluarga mendapat julukan putra. Putra berasal dari kata “*put*” yang artinya neraka dan kata “*ra*” artinya menyelamatkan. Jadi putra artinya ia yang menyelamatkan orang tua/leluhur dari neraka. Oleh sebab itu sangat diharapkan dalam sebuah keluarga itu dapat melahirkan keturunan/anak. Jika perkawinan tidak bisa mendapatkan

keturunan (anak) maka dapat mengadopsi (mengangkat anak yang statusnya menjadi anak kandung) untuk melanjutkan keturunan keluarganya.⁸

Tujuan mencapai kebahagiaan dan melanjutkan keturunan yang diakui oleh hukum dan agama. Terlepas dari batasan serta pengertian di atas, akan ditinjau perkawinan dari segi perundang-undangan yang berlaku saat ini, yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 UU Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dari rumusan Pasal 1 tersebut di atas, dapat diperinci beberapa unsur yang memberikan sifat perkawinan itu sendiri. Adapun unsur-unsur yang dimaksud di atas adalah sebagai berikut :

1. Adanya ikatan lahir bathin

Perkawinan dapat dikatakan sebagai suatu persetujuan yang dapat menimbulkan ikatan. Ikatan ini bukan saja dalam bentuk ikatan lahiriah, tetapi juga ikatan bathiniah antara seorang pria dan wanita, bahkan ikatan bathin ini merupakan inti dari pada ikatan lahir.

2. Antara seorang pria dan wanita

Unsur pria dan wanita ini menunjukkan bahwa secara biologis orang yang melangsungkan perkawinan haruslah berbeda jenis kelamin, hal ini

⁸ I Nyoman Arthayasa, Sujaelanto dan Ketut Yeti Suneli, *Petunjuk Teknis Perkawinan Hindu*, Paramita, Surabaya, 1998, hlm. 3 - 4.

sangat penting oleh karena perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yaitu menghendaki adanya keturunan.

3. Sebagai Suami Istri

Seorang pria dan wanita yang sudah terikat dalam suatu perkawinan, secara yuridis statusnya berubah. Pria berubah status sebagai suami dan wanita berubah status sebagai istri.

4. Adanya tujuan

Tujuan dalam perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Seorang wanita yang telah mempunyai ikatan lahir bathin kemudian melangsungkan perkawinan haruslah menuju pada suatu perkawinan yang kekal, bukan untuk masa tertentu atau sebagai suatu permainan.

5. Adanya unsur didasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa

Unsur ini mengandung arti bahwa perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan kita tidak cukup hanya memenuhi unsur-unsur tersebut harus dilandasi oleh ajaran keyakinan Ketuhanan yang dianut oleh keluarga yang bersangkutan.

2.2. Bentuk-bentuk Perkawinan

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan untuk memperoleh keturunan. Tentang keturunan ini pada umumnya sistim

kekeluargaan yang ada di dalam masyarakat hukum adat Indonesia dikenal tiga jenis :

1. *Sistim Patrilineal*, yaitu suatu masyarakat hukum di mana anggota-anggotanya menarik garis keturunan ke atas melalui bapak, bapak dari bapak terus ke atas sehingga dijumpai seorang laki-laki sebagai moyangnya.
2. *Sistim matrilineal*, yaitu suatu sistim dimana masyarakat tersebut menarik garis keturunan ke atas melalui ibu, ibu dari ibu, terus ke atas sehingga dijumpai seorang perempuan sebagai moyangnya.
3. *Sistim Parental* atau *Bilateral* adalah masyarakat hukum, dimana para anggotanya menarik garis keturunan ke atas melalui garis bapak dan garis ibu, sehingga dijumpai seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai moyangnya.

Jika cara menarik garis keturunan yang hanya melalui satu garis saja disebut dengan masyarakat Unilateral. Sedangkan menarik garis keturunan dari kedua-duanya, baik dari garis bapak maupun garis ibu disebut masyarakat dengan sistim bilateral. Pada umumnya pada masyarakat patrilineal perkawinan memakai sistim uang jujur, yaitu sebagai pelepas serta pengganti keseimbangan lahir dan batin dari keluarga wanita.⁹

Dalam perkawinan ini, uang jujur (*bride-price*) menyimpul pembayaran uang dan barang-barang dari kelompok kerabat si pria kepada kelompok kerabat wanita dengan tujuan memasukkan si wanita ke dalam bagian garis suaminya,

⁹ I.G.N. Sugangga, *Hukum Adat Waris Pada Masyarakat Hukum Adat yang Bersistim Patrilineal di Indonesia*, Semarang, 1988, hlm. 17 – 18.

demikian pula anak-anaknya, yang selaku warga generasi termuda bertugas melanjutkan garis hidup dan ayahnya.¹⁰

Dari rumusan di atas, bahwa fungsi dari pada jujur adalah :

1. Secara yuridis, untuk mengubah status keanggotaan dari pihak pengantin wanita.
2. Secara ekonomis, membawa pergeseran dalam kekayaan pada kelompok pengantin wanita.
3. Secara sosial tindakan menyerahkan jujur itu mempunyai arti bahwa pihak pengantin wanita mempunyai kedudukan yang dihormati.

Walaupun istilah jujur tidak masing-masing daerah masyarakat adat Indonesia, penyebutannya berbeda-beda, tetapi punya tujuan yang hampir sama antara lain ; untuk daerah Nias Selatan disebut "*beuli niha*", untuk Gayo "*unjuk*", untuk Batak "*unjuk*", "*sinamot*", "*pangolik*", "*boli*", "*tuhor*", Tapanuli Selatan dan Sumatra Selatan "*jujur*", Lampung "*serah*", Dasemah "*kule*", Maluku "*Wilin*", "*beli*", Timor "*belis*", Bali "*patukun luh*".

Bentuk perkawinan jujur ini dapat dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain :

1. Perkawinan mengabdikan

Apabila seorang suami tidak mampu membayar jujur secara kontan, dalam arti pelunasan jujur ditunda. Dalam keadaan demikian si suami hidup

¹⁰ Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm. 117.

dengan istrinya di lingkungan kerabat istri dan bekerja mengabdikan kepada mertuanya sampai jujur tersebut dapat dilunasi. Perkawinan mengabdikan di Bali disebut *Nunggonin*.¹¹

2. Perkawinan bertukar

Perkawinan ini terjadi apabila seorang laki-laki mengawini seorang gadis, dan dilain pihak saudara laki-laki si gadis kemudian mengawini saudara perempuan laki-laki. Bentuk perkawinan semacam ini sangat dihindari, karena adanya kepercayaan dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.

Perkawinan semacam ini di Bali disebut perkawinan "*Makedengngad*".

3. Perkawinan meneruskan

Perkawinan semacam ini terjadi apabila si istri meninggal dunia dan si suami kawin lagi dengan saudara perempuan si istri.

Dalam perkawinan yang kedua, tidak lagi diperlukan pembayaran jujur, karena istri yang kedua ini seolah-olah meneruskan kedudukan istri yang pertama.

4. Perkawinan mengganti

Apabila seorang suami meninggal, kemudian si janda dikawini oleh saudara laki-laki suaminya. Dalam perkawinan yang kedua ini juga tidak

¹¹ Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar untuk Mempelajari Hukum Adat*, Cet. II, CV. Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 103.

diperlukan lagi membayar jujur, karena suami yang kedua ini menggantikan kedudukan saudara yang sudah meninggal.

5. Perkawinan ambil anak

Apabila dalam suatu keluarga tidak mempunyai anak laki-laki, si ayah akan mengambil seorang anak laki-laki untuk dikawinkan dengan anak perempuannya.

Pembayaran jujur dilakukan oleh pihak istri sehingga laki-laki tersebut lepas dari keluarganya dan anak yang dilahirkan dari perkawinan ini akan meneruskan keturunan dari ayah mertuanya. Perkawinan semacam ini di Bali dikenal dengan istilah *Kawin Nyentana*.¹²

Pada masyarakat uniteral yang bersifat matrelinial bentuk perkawinannya disebut *Kawin Semendo*.

Perkawinan semendo adalah bentuk perkawinan yang bertujuan untuk secara konsekuen melanjutkan keturunan pihak ibu.¹³

Setelah perkawinan terjadi, maka suami berada di bawah kekuasaan kerabat istri dan kedudukan hukumnya bergantung pada bentuk perkawinan semendo yang berlaku, apakah perkawinan semendo dalam bentuk "semendo

¹² Tjok. Istri Putra Astiti, *Perkawinan Menurut Hukum Adat dan Agama Hindu di Bali*, Biro Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana, Denpasar, 1981, hlm. 241.

¹³ Djanen Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Cet. I, Tarsito, Bandung, 1980, hlm. 135.

raja-raja”, “semendo bebas”, “semendo nunggu”, “semendo ngangkit” dan “semendo anak dagang”.¹⁴

Bentuk-bentuk Perkawinan Semendo

1. Perkawinan Semendo Raja-raja

Adalah dimana suami istri sebagai raja dan ratu yang dapat menentukan sendiri tempat kedudukan rumah tangganya terhadap harta kekayaannya yang diperoleh sebelum perkawinan suami istri mempunyai kedudukan yang seimbang. Anak-anak yang lahir diberi kebebasan untuk memilih apakah akan mewarisi ibu ataukah ayahnya.

2. Perkawinan Semendo Lepas

Dalam perkawinan ini suami melepaskan hak dan kedudukannya di pihak kerabatnya dan masuk kerabat istrinya. Bentuk ini sama dengan perkawinan ambil anak.

3. Perkawinan Semendo Nunggu

Adalah suatu perkawinan semendo yang sifatnya sementara, maksudnya suami bertempat tinggal di kerabat istri sampai dengan tugas dan tanggungjawabnya terhadap keluarga mertua selesai diurusnya.

4. Semendo Anak Dagang

Dalam perkawinan ini si suami datang ke rumah si istri tanpa membawa apa-apa. Si suami dapat datang ke tempat istri sewaktu-waktu.

¹⁴ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Cet. I, Mandar Maju, Bandung, 1992, hlm. 185.

5. Semendo Nyangkit

Perkawinan ini terjadi apabila seorang tidak mempunyai anak perempuan dan hanya mempunyai anak laki-laki.

Sedangkan bentuk perkawinan bebas atau perkawinan mandiri pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat adat yang bersifat parental (bilateral), seperti berlaku pada masyarakat Jawa, Sunda, Aceh, Melayu, Kalimantan dan Sulawesi dan di kalangan masyarakat Indonesia yang modern, dimana kaum keluarga atau kerabat tidak banyak lagi campur tangan dalam keluarga/rumah tangga.¹⁵

2.3. Perkawinan Adat Bali Menurut Agama Hindu

Dalam ajaran agama Hindu yang bersumber pada Menawa Dharma Sastra dikenal ada 8 jenis perkawinan, yaitu Brahma wiwaha, Daiva wiwaha, Arsha wiwaha, Prajapati wiwaha, Asura wiwaha, Ghandarwa wiwaha, Raksasa wiwaha, Faisaca wiwaha.¹⁶

1. Brahmana Wiwaha

Pemberian seorang gadis setelah terlebih dahulu dihias serta menghormati dengan menghadiahkan permata kepada seorang yang ahli dalam weda yang diundang oleh ayah si wanita. Pengganti pria ini harus ahli waris dalam weda dan bertingkah laku yang suci.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 186.

¹⁶ Wenten, *Tetandingan Banten Manusa Yadnya*, Indrajaya, Singaraja, 1999, hal. 31.

2. Daiva wiwaha

Pemberian seorang anak dengan perhiasan, kepada seorang pendeta yang melaksanakan upacara pada saat upacara itu berlangsung. Sebagai kelanjutannya upacara ini, orang tua pihak keluarga yang mengadakan upacara itu secara sadar dan sukarela menyerahkan anaknya untuk dinikahi dengan tujuan untuk mendapatkan keturunan yang baik.

3. Arsa wiwaha

Perkawinan yang disahkan menurut hukum setelah pihak orang tua si wanita telah menerima tanda maskawin berupa seekor lembu atau sapi.

4. Prajapati wiwaha

Pemberian seorang anak perempuan oleh ayah si wanita setelah berpesan kepada mempelai dengan mantra dan setelah menunjukkan penghormatan kepada mempelai pria.

5. Asura wiwaha

Seorang pria menerima seorang pengantin wanita setelah pria itu memberikan maskawin sesuai kemampuan dan didorong oleh keinginannya sendiri kepada mempelai wanita dan keluarganya.

6. Ghandarwa wiwaha

Pertemuan kedua mempelai yang didasarkan pada suka sama suka yang timbul dari nafsunya dan bertujuan melakukan hubungan sex. Yang terpenting dari perkawinan ini ialah bahwa perkawinan itu harus dilakukan retuil.

7. Raksasa wiwaha

Melarikan seorang gadis dengan paksa dari rumahnya dimana si wanita berteriak-teriak menangis setelah keluarganya dibunuh atau terluka, rumahnya dirusak.

8. Faisaca wiwaha

Perkawinan yang dilakukan dengan cara mencuri wanita yang sedang tidur, acara ini sangat rendah dan penuh dosa. Perkawinan ini mirip dengan raksasa wiwaha, hanya bedanya dengan Faisaca adalah si wanita dalam keadaan tak sadar.

Pada saat ini tidak semua cara perkawinan itu dapat dilaksanakan dalam masyarakat, tetapi menurut hukum adat di Bali yang masih hidup sampai saat sekarang hanya mengenal adanya dua cara perkawinan yaitu bentuk perkawinan biasa dan bentuk perkawinan Nyentana.¹⁷ Perkawinan tersebut yang sangat umum dapat dilakukan serta merupakan cara yang sah, yaitu :

2.3.1. Bentuk perkawinan biasa

Dalam bentuk perkawinan ini calon istri beralih ke pihak keluarga calon suami. Bentuk inilah yang secara umum berlaku di Bali dan selanjutnya disebut dengan istilah bentuk perkawinan biasa.

Perkawinan biasa ini dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu :

a. Memadik/ngidih (meminang)

¹⁷ Sagung Ngurah dan Ni Nyoman Sukerti, *Lembaga Jiwa Dana Sebagai Suatu Penerobosan Terhadap Hukum Adat Waris Bali*, Kertha Patrika, Cet. XV, 1989, hlm. 46.

- b. Mejangkepan/kepekardiyang
- c. Merangkat/ngelayat/ngerorod.¹⁸

Ad. a) Memadik/ngidih (meminang)

Perkawinan ini adalah merupakan bentuk perkawinan yang didahului oleh adanya permintaan yang dilakukan oleh keluarga calon pihak suami kepada calon pihak istri. Sesudah adanya kesepakatan kemudian dilanjutkan dengan terlibatnya pihak keluarga yang berkepentingan, dalam hal ini keluarga laki-laki untuk mengambil inisiatif melakukan peminangan ke rumah orang tua si wanita.

Jika peminangan ini sudah diterima oleh pihak keluarga calon istri, maka pada hari yang telah ditentukan untuk upacara maka keluarga calon suami membawa dan menyerahkan uang yang maksudnya adalah tidak lain daripada “jujur” dan biasanya penyerahannya terdiri dari pakaian wanita dan alat-alat perhiasan lainnya, maka saat itulah calon mempelai sah bertunangan dan saat menunggu hari baik atau dewasa ayu untuk melangsungkan upacara perkawinan.

Ad. b. Perkawinan Mejangkepan/kepekardiyang (dijodohkan)

Perkawinan Mejangkepan/Kepekardiyang ini merupakan suatu bentuk perkawinan yang sebenarnya timbul dari inisiatif dari orang tua kedua calon pasangan suami istri. Kedua calon pengantinlah yang sebenarnya menginginkan supaya perkawinan itu dilangsungkan.

¹⁸ Anak Agung Ngurah Kaleran dan I Gusti Oka, *Hukum Perkawinan Secara Adat dan Agama Hindu*, Denpasar, 1968, hlm. 27.

Biasanya mereka itu merupakan orang yang ada hubungan keluarga dekat satu sama lainnya yang maksudnya adalah untuk mempererat hubungan antara keluarga yang bersangkutan dan juga sering perkawinan ini dipergunakan sebagai penghalang dari terselenggarakannya perkawinan ngerorod/ngerangkat, yang sebenarnya sudah direncanakan dari anak perempuan mereka dengan laki-laki lain itu adalah termasuk anggota “Kasta” yang dipandang mereka itu lebih rendah dari pada mereka sendiri.

Adakalanya ide ini datang dari kedua belah pihak keluarga laki-laki dan keluarga perempuan yaitu dengan membujuk anaknya agar mau dipertemukan atau dikawinkan. Apabila kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan sama-sama setuju, maka kedua orang tua masing-masing sama-sama berusaha mengadakan pendekatan bersama. Akan tetapi ada pula antara laki-laki dan perempuan yang hendak dikawinkan sama sekali tidak tahu tentang maksud para orang tua masing-masing calon pengantin, sehingga pada suatu saat kedua calon pengantin dipaksa untuk masuk kedalam suatu kamar yang kemudian dikunci dari luar.

Kalau kedua belah pihak mau masuk kedalam kamar, maka mereka dianggap telah menyetujui perkawinan, sehingga pada saat nanti dilangsungkan upacara “natab” banten pekala-kalaan yang terlebih dahulu dicari hari yang baik untuk upacara sehingga perkawinan itu dapat disahkan dengan upacara yang telah disebutkan di atas.

Ad. c. Perkawinan Merangkat/Ngelayat/Ngerorod (kawin lari)

Yang dimaksud perkawinan Merangkat/Ngelayat/Ngerorod ialah suatu bentuk perkawinan yang diselenggarakan atau inisiatif sendiri yang bebas oleh kedua calon suami istri dengan jalan melarikan diri bersama-sama. Dalam bentuk perkawinan ini tidak ada pihak yang dianggap obyek yang positif, tak ada yang dilarikan dan tidak ada yang melarikan. Pemuda dan gadis keduanya adalah pelaksana yang aktif.

Jadi dengan demikian hanya mungkin dilaksanakan atas dasar suka sama suka, adanya kemauan antara kedua belah pihak, adanya cinta sama cinta.

2.3.2. Perkawinan Nyentana

Dalam perkawinan Nyentana ini merupakan kebalikan dari pada perkawinan biasa, dan perkawinan nyentana ini merupakan jenis perkawinan dimana didalam upacaranya diselenggarakan oleh pihak keluarga perempuan dan kelangsungan upacaranya pun di rumah si perempuan. Bentuk ini hanya sebagian kecil saja terjadinya di propinsi Bali khususnya di Kabupaten Tingkat II Tabanan karena alasan-alasan dan faktor-faktor tertentu.

Dalam perkawinan nyentana hubungan keluarga si suami dilepaskan dan masuk ke keluarga si perempuan dan pelepasan ini dilakukan dengan membayar uang yang biasanya disebut uang jujur. Perkawinan ini hanya bisa atau boleh dilaksanakan oleh orang tua yang hanya mempunyai anak perempuan saja.

Disini suamilah yang pindah dari keluarganya dan masuk dalam kelompok pihak istri dan si istri pula yang menjadi ahli waris kekayaan bapaknya, sedangkan suami kedudukannya tidak mendapat warisan, dalam perkawinan hak waris atau benda atau harta benda hilang sama sekali bilamana bapaknya meninggalkan harta warisan.

Dalam perkawinan nyentana ini, apabila dilihat dari kedudukan suami ada tiga macam yang masing-masing mempunyai akibat hukum yang berbeda-beda, yaitu :

a. Sentana Kepala Dara

Yaitu seorang laki-laki yang kawin nyeburin dan dengan jalan "diperas" dimasukkan sama sekali dalam keluarga sah angkatnya untuk diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri.

b. Sentana Tarikan/Nyeburin

Yaitu seorang laki-laki yang kawin nyeburin dan diperlakukan sebagai orang perempuan.

c. Sentana Seledihi atau Silih-Dihi

Yaitu seorang laki-laki yang kawin nyeburin diberi hak mewaris oleh orang tua angkatnya akan tetapi tidak diperas.¹⁹

Sentana Seledihi dan Sentana Kepala Dara mempunyai akibat hukum yang sama yaitu sama-sama sebagai ahli waris terhadap harta mertuanya,

¹⁹ I Wayan Beni dan Sagung Ngurah, *Hukum Adat Di Dalam Yurisprudensi*, Surya Jaya, Cet. II, 1986, hlm. 32.

sedangkan Sentana Nyeburin bukan sebagai ahli waris, karena ia berstatus sebagai wanita (predana).

2.3.3. Sebab-sebab Timbulnya Perkawinan Nyentana

Sesuai dengan adat yang berlaku di dalam masyarakat hukum adat Bali, hanya anak laki-laki yang berhak sebagai ahli waris dan ia akan melanjutkan keturunan. Bahkan adanya anggapan bahwa anak laki-laki merupakan penyelamat arwah leluhurnya dari lembah penderitaan dan membawanya ke alam kebahagiaan seperti disebutkan di dalam Kitab Manawa Dharma Sastra buku ke IX Pasal 137 yang menyebutkan :

Pasal 137 :

Melalui anak laki-laki ia menundukkan dunia, melalui cucu laki ia mencapai kekekalan tetapi melalui anak dari cucunya ia mencapai alam matahari.²⁰

Sedangkan anak perempuan tidak demikian halnya, oleh karena itu keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki dan hanya mempunyai anak perempuan saja, maka anak perempuan itu dapat menggantikan kedudukan anak laki-laki.

Apabila suatu keluarga tidak mempunyai anak sama sekali baik laki-laki maupun wanita, maka keluarga tersebut dapat mengangkat anak orang lain diusahakan terlebih dahulu dari pihak purusa dengan jalan diperas yang dimaksud untuk dijadikan anak kandung sendiri.

²⁰ Gde. Pudja, *Op. cit*, hlm. 32

Sebagaimana telah dikemukakan dalam bab I terdahulu, agar anak perempuan itu dapat melanjutkan keturunan terlebih dahulu statusnya harus diangkat menjadi sentana luh atau sentana rajeg.

Sentana luh/sentana rajeg ini pada mulanya hanya dikenal di daerah "*Apanag e*" (kabupaten-kabupaten : Tabanan, Badung, Gianyar dan Klungkung) karena pengaruh kerajaan-kerajaan Majapahit Gelgel/Klungkung dan banyaknya terdapat puri-puri serta adanya hak camput raja-raja.

Hak Camput adalah apabila seorang ayah meninggal tanpa meninggalkan anak laki-laki dan hanya meninggalkan janda serta anak perempuan yang belum kawin, maka harta warisan itu akan diambil alih oleh raja-raja maupun pembesar-pembesar yang mendapat kepercayaan ataupun kekuasaan dari raja dan selanjutnya janda serta anak perempuannya yang belum kawin dipelihara di puri yang didalam bahasa Bali disebut dengan "*Manjing*" ke puri. Hak camput raja-raja ini hanya berlaku terhadap golongan kaula jaba saja.

Untuk menghindari hak camput raja-raja ini, maka seorang ayah yang tidak mempunyai anak laki-laki diberikan untuk mengangkat anak perempuannya menjadi status laki-laki, di mana pengangkatan status ini oleh agama Hindu dan hukum adat Tabanan dapat dibenarkan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diringkaskan yang menjadi sebab dari dilakukannya perkawinan Nyentana adalah :

- a. Orang tua tidak mempunyai anak laki-laki dan hanya mempunyai anak perempuan saja.

- b. Adanya keinginan dari pada orang tua untuk tetap berkumpulnya dengan semua anaknya
- c. Anak laki-lakinya cacat mental
- d. Harta peninggalan orang tua dapat diwariskan pada anak kandungnya sendiri.

2.4. Syarat-syarat dan Sahnya Perkawinan

Didalam rangka mengatur masalah perkawinan warganya, masyarakat Hindu di Bali sekarang ini berpegang kepada dua aturan sekaligus dan bersamaan yaitu Undang-undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) yang bersifat Nasional dan adat istiadat yang bersumber pada agama Hindu.

Dalam hal membicarakan syarat-syarat perkawinan ini memang perlu dipenuhi karena sangat erat hubungannya dengan tujuan perkawinan, yaitu keluarga bahagia dan sejahtera. Syarat-syarat perkawinan secara umum ada dua macam; pertama syarat yang bersifat lahiriah yang meliputi faktor usia, status, tidak terikat perkawinan dengan orang lain, berbadan sehat. Sedang syarat kedua adalah bersifat batiniah yang meliputi; mempunyai keimanan yang sama (satu agama), saling cinta mencintai. Syarat berupa fisik dalam perkawinan ini sangat penting artinya karena dampaknya pada masalah hasil keturunan. Keturunan atau sentana adalah merupakan idaman bagi orang yang sudah berumah tangga, oleh karena keturunan inilah yang kelak bisa membebaskan orang tuanya dari penderitaan dan kesengsaraan baik di alam nyata maupun di alam gaib.

Persyaratan secara *Batiniah* adalah :

- a. Perkawinan hendaknya dilaksanakan berdasar cinta sama cinta

Memiliki rasa cinta diantara kedua calon mempelai merupakan landasan dalam membentuk keluarga bahagia, maka perasaan optimis untuk hidup sejahtera bahagia dan bertanggung jawab dapat tercapai. Kehidupan rumah tangga yang tidak didasari rasa cinta akan segera mengalami kehancuran.

- b. Sebelum dilaksanakan perkawinan kedua calon mempelai harus memiliki keimanan yang sama (satu agama)

Persyaratan secara *Lahiriah* adalah sebagai berikut ;

1. faktor usia merupakan syarat yang sangat penting dan menentukan.

Perbedaan umur antara pria dan wanita secara psikologis membawa dampak dalam kehidupan berumah tangga. Pria dalam batas umur tertentu masih mampu memproduksi dan sehat untuk melaksanakan hubungan jasmani. Sedangkan wanita dalam batas umur tertentu tidak mampu lagi memproduksi lagi sel telur. Disisi lain jika wanita lebih muda dari prianya maka mereka akan tetap menjaga rasa cintanya dalam keutuhan keluarga, sehingga keharmonisan akan tetap terjaga.

2. bibit, bebet, bobot

Untuk mendapatkan jodoh yang diidam-idamkan memang tidak mudah. Segalanya harus ditinjau dari berbagai segi, diantaranya sehat lahir

batin. Orang-orang tua kita dalam memilih bakal menantu, yang tidak pernah diabaikan ialah *Bibit-Bebet-Bobot*.²¹

Bibit artinya pesemaian muda yang akan ditanam. Bibit disini mengandung makna bahwa calon penganten itu berpendidikan, berbudi pekerti yang luhur. Oleh karena itu pasangan calon suami istri hendaknya mempunyai pendidikan yang seimbang, sebab apabila tidak akan mempengaruhi dalam komunikasi keluarga. Keluarga itu merupakan lembaga komunikasi dan diskusi yang terjadi setiap hari. Tanpa komunikasi dan diskusi seolah-olah dalam keluarga itu terasa mati. Komunikasi dan diskusi dalam keluarga terjadi jika pengetahuan mereka seimbang.

Bobot artinya berat, maksudnya apakah kedudukan sosial ekonomi orang tua mereka seimbang, sehingga tidak merupakan neraca yang berat sebelah. Hal ini juga akan menyebabkan sosial komunikasi yang kurang baik.

Bebet artinya keturunan. Apakah dia keturunan dari orang baik-baik, dalam arti siapakah yang menurunkan silsilah/keturunan calon mempelai harus diperhatikan. Harus diketahui apakah dia tidak mempunyai penyakit yang membahayakan, menular dan sebagainya.

Memperhatikan persyaratan umum yang disebut di atas, harus dipenuhi karena ikatan merupakan syarat mendasar dalam mendapat keturunan yang mulia (putra yang saputra) dan membina keluarga bahagia.

²¹ I Nyoman Arthayasa, Sujaelanto, Ketut Yeti Suneli, *Op. cit*, hlm. 12.

2.4.1. Syarat-syarat Perkawinan

Untuk dapat dilangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1));
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua (Pasal 6 ayat (2));
- c. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 ayat (1));
- d. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu (Pasal 11 ayat (1)).

Selain syarat-syarat yang disebutkan dalam Undang-undang ada beberapa syarat-syarat yang perlu diperhatikan dalam adat yang dianut oleh masyarakat beragama Hindu di Bali, yaitu;

- a. Kedua mempelai telah menganut agama Hindu

Jika calon mempelai itu belum beragama Hindu, maka perkawinan tidak dapat disahkan. Apabila salah satu atau kedua-duanya belum beragama Hindu, maka terlebih dahulu di Sudhikan (upacara keagamaan) mulai memeluk secara resmi menjadi penganut agama Hindu. Sebab dalam hukum

perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan dengan agamanya atau kepercayaannya masing-masing.²²

- b. Dalam upacara perkawinan terdapat unsur persaksian yang meliputi Dewa Saksi, Butha Saksi, Manusa Saksi.
- c. Setiap perkawinan secara agama Hindu harus dilaksanakan melalui Samsakara. Samsakara adalah upacara yang sakral juga merupakan sumpah dan janji kedua mempelai untuk melaksanakan rumah tangga yang kekal. Sumpah dan janji terhadap Tuhan, leluhur yang bersangkutan agar kekal bahagia yang berlandaskan pada dharma agama dan dharma negara.
- d. Untuk mengesahkan perkawinan secara agama Hindu harus diselesaikan oleh Pendeta/Pinandhita.

Disamping syarat-syarat tersebut di atas juga harus diperhatikan berkenaan dengan adanya larangan perkawinan bagi orang yang akan melaksanakan perkawinan.

Dalam UU No. 1/1974 Pasal 8 ayat (a, b sampai f), bahwa *Perkawinan yang Dilarang* adalah jika;

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau pun ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;

²² *Ibid*, hlm. 15.

- c. Berhubungan semenda yaitu dengan mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 8 tersebut, bahwa larangan perkawinan secara umum mencerminkan pada nilai normatif dan etika. Dilihat dari sudut etika bahwa terjadi pelanggaran terhadap larangan perkawinan akan menimbulkan incest, cuntaka, tabu. Seorang yang melanggar perkawinan dikatakan bukan lagi sebagai pola hidup sebagai manusia. Dalam kehidupan binatang tidak ada istilah incest, tabu antara anak dengan anaknya. Oleh karena itu baik hukum agama maupun perundang-undangan membenarkan adanya larangan perkawinan, untuk menghindari terjadinya incest, tabu, cuntaka serta untuk menghindari terjadinya kerancuan terhadap kedudukan hukum keluarga/perdata.

Larangan yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (a) sampai dengan (e) berlaku secara umum. Sedangkan untuk ayat (f) berlaku pada hukum adat atau agamanya masing-masing.

Dalam Hukum Adat Bali yang didasari oleh agama Hindu, bahwa perkawinan yang dilarang apabila:

- a. Perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam garis lurus ke atas ke bawah, baik lahir dalam perkawinan yang sah/tidak sah ataupun karena diperas.
- b. Perkawinan antara seorang laki dengan ibu/ibu tiri dan perkawinan seorang anak perempuan dengan bapak/bapak tiri.
- c. Perkawinan antara mertua dan menantu atau antara warang (besan).²³

Dan ada juga larangan perkawinan, yang terdapat dalam hukum Hindu diantaranya adalah :

- a. Keadaan fisik dan psikis yang merupakan cacat menahun yang tidak dapat disembuhkan
- b. Gila atau sakit ingatan
- c. Pria yang wandu/impoten.²⁴

Setelah syarat-syarat di atas sudah terpenuhi, maka selanjutnya diatur mengenai tata cara yang harus ditempuh untuk melangsungkan perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Di dalam Pasal 3 dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut, menentukan juga syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan

²³ Gede Panitje, *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*, Guna Agung, Denpasar, hlm. 64.

²⁴ I Nyoman Arthayasa, Sujaelanto, Ketut Yeti Suneli, *Op. cit*, hlm. 17.

berlangsung yaitu bahwa setiap orang yang melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan. Pemberitahuan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.

2.4.2. Sahnya Perkawinan

Setelah diketahui syarat-syarat perkawinan yang harus ditempuh untuk melangsungkan perkawinan, maka selanjutnya ditinjau mengenai sahnya suatu perkawinan.

Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, menentukan bahwa :

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari ketentuan di atas tentang sahnya suatu perkawinan, mutlak harus dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Mengenai perbuatan pencatatan perkawinan ini bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat. Hal itu dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan juga sebagai suatu alat bukti yang tertulis dan othentik.

Sehubungan dengan sahnya suatu perkawinan, apabila telah dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, ini berarti Undang-undang Perkawinan menempatkan peranan yang sangat besar terhadap hukum agama dalam bidang pengesahan perkawinan tersebut. Sebagaimana dimaklumi

bersama bahwa dalam wilayah Republik Indonesia terdapat bermacam-macam cara dalam pengesahan perkawinan tersebut.

Apabila diperhatikan dalam kenyataan di dalam masyarakat Adat Bali, bahwa antara hukum agama dan hukum adat proses pengembangannya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, sehingga ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan bagi umat yang beragama Hindu di Bali masih berlaku hukum adat secara bersama-sama dengan agama, sehingga sulit untuk membedakan mana hukum adat dan mana hukum agama.

Menurut agama Hindu di Bali, sahnya perkawinan apabila telah dilakukan upacara mebiyakaon (biakala). Pendirian yang demikian terdapat dalam keputusan Raad Kerta Singaraja Tanggal 11 April 1932 No. 49/civil mengenai perkawinan di Desa Jineng Dalem, Distrik Buleleng.²⁵

Perkawinan menurut agama di Hindu Bali barulah menjadi sah, manakala kedua mempelai telah menyelenggarakan upacara perkawinan menurut agama, yaitu upacara natab bebaten pesakapan (mekala-kala), yang diselenggarakan di bawah pimpinan pemuka agama.²⁶

Dalam kaitannya dengan sahnya perkawinan itu pula, maka Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 Juli 1980 No. 602/Pdt/1980/PN. Dps, menetapkan bahwa suatu perkawinan dianggap sah menurut hukum adat Bali apabila dilakukan pebiyakaon atau mebiyakaon, ataupun metanjung-sambuk, sedangkan

²⁵ Gde Panetje, *Op. cit*, hlm. 109.

²⁶ A.G. Ngurah Kaleran dan Gusti Agung Oka, *Op. cit*, hlm. 15.

nunas (menikmati-tikar) tidak menjadi syarat mutlak perkawinan. Begitu juga ditetapkan bahwa menurut hukum adat Bali suatu perkawinan dianggap sah apabila telah dilakukan upacara pebiyakaon dan kemudian diikuti oleh upacara-upacara makala-kala dan upacara pejauman.²⁷

Disamping sahnya perkawinan menurut agama Hindu, harus ada Tri Upa Saksi maksudnya ada 3 (tiga) unsur saksi diantaranya :

- a. Dewa Saksi, yaitu adanya banten di merajan (sanggah surya);
- b. Manusa Saksi, yaitu orang-orang tertentu yang menyaksikan upacara perkawinan itu, seperti Kepala Desa, Kelihan Adat/Kelihan Dinas, Bendesa Adat;
- c. Butha saksi, yaitu adanya banten di sor atau di bawah, misalnya banten biyakaon.

Dengan demikian perkawinan sudah dianggap sah menurut hukum adat, bilamana telah dilakukan dengan upacara pebiyakaonan dan dengan disaksikan oleh Tri Upa Saksi. Dengan demikian bagi masyarakat Bali yang beragama Hindu, untuk menyebut suatu perkawinan itu sudah sah dan mendapat suatu pengakuan dari masyarakat dipergunakan istilah "puput".

2.5. Putusnya Perkawinan

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga yang berbahagia dan kekal, keinginan ini adalah idealisme tiap keluarga, terkadang

²⁷ I Wayan Benny, *Op. cit*, hlm. 51.

idealisme ini lantas luntur, ada saja sebagai penyebabnya. Mungkin tidak terdapat lagi kesepakatan atau saling pengertian antara satu dengan yang lainnya dalam keluarga, mungkin malah terjadi suatu perselisihan yang berkelanjutan, walaupun sudah diupayakan untuk menentramkan keadaan, tetapi perselisihan ini semakin terus menerus, atau tidak mungkin didamaikan lagi.

Perkawinan yang keadaannya kacau balau, atau tidak ada rasa nyaman lagi, maka demi kepentingan dua belah pihak, perkawinan itu lebih baik di putus.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo bahwa istilah putus perkawinan dapat diganti istilah lain (*ander wood*) yaitu “penghentian” atau pecah perkawinan, tiga istilah tersebut mempunyai pengertian (makna) sama. “Pecah” menurut kamus berarti terbelah menjadi beberapa bagian, retak atau rekah; bercerai berai; sedangkan “putus” berarti tidak berhubungan lagi berarti stop.²⁸

Menurut Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan dapat putus karena :

1. Kematian
2. Perceraian dan
3. Atas Keputusan Pengadilan

Ad. 1. Putusnya perkawinan karena kematian

Yang dimaksud dengan kematian disini bukanlah kematian perdata (*lemort civile*), akan tetapi kematian daripada pribadi orangnya bahkan yang

²⁸ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT. Abadi, Jakarta, Cet. I, 2002, hlm. 42

dimaksud oleh Undang-Undang adalah kematian salah satu pihak, ataukah sang suami ataukah sang istri akan tetapi bukan kedua-duanya, sebab seandainya kedua-duanya meninggal tidak perlu lagi kita bicarakan mengenai akibat-akibat putusnya perkawinan terhadap pihak-pihak

Ad. 2. Putusnya perkawinan karena perceraian

Yang dimaksud dengan perceraian disini adalah batasan waktu mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri
3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Jadi dimaksud dengan putusnya perkawinan karena perceraian adalah apabila pengadilan berusaha dengan sekuat tenaga tidak berhasil untuk mendamaikan para pihak untuk hidup rukun, maka salah satu pihak, maupun para pihak mengajukan perceraian kepada pengadilan, sedangkan yang dimaksud dengan putusnya perkawinan karena putusan Pengadilan dalam perceraian itu sendiri.²⁹

Alasan-alasan kuat yang dapat diajukan kepada Pengadilan untuk dapat bercerai adalah :

²⁹ I Nyoman Arthayasa, Sujaelanto, Ketut Yeti Suneli, *Op. cit*, hlm. 21.

1. Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, penjudi dan yang sejenisnya yang sulit disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin dari pihak suami/istri.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman selama lima tahun atau hukuman yang paling berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit, dengan akibatnya tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami /istri.
5. Antara suami dan istri tidak cocok lagi menjadi perselisihan yang tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga.

2.6. Tinjauan Tentang Pewarisan

Didalam masyarakat adat Indonesia dikenal adanya tiga macam sistem kewarisan, yaitu :

- a. Sistem kewarisan individual
- b. Sistem kewarisan kolektif
- c. Sistem kewarisan mayorat

Ad. a) Sistem kewarisan individual

Dalam sistem kewarisan harta peninggalan akan diwarisi bersama-sama, dibagi-bagi kepada semua ahli waris (individual). Sistem ini dapat dilihat pada masyarakat bilateral di Jawa.

Ad. b) Sistem kewarisan kolektif

Dalam sistem kewarisan ini, harta peninggalan akan diwarisi secara kolektif (bersama-sama) oleh sekumpulan ahli waris, dimana harta warisan tersebut tidak akan dibagi-bagikan seperti pada sistem kewarisan individual. Pada sistem ini harta warisan akan dinikmati secara bersama-sama. Ahli waris hanya mempunyai hak pakai atau boleh menikmati saja dari harta warisan dan tidak mempunyai/tidak dapat memiliki harta warisan tersebut. Hal seperti ini dapat dilihat pada pewarisan harta pusaka.

Ad. c) Sistem kewarisan mayorat

Dalam sistem kewarisan ini, harta peninggalan secara keseluruhan atau sebagian besar akan diwarisi oleh seorang ahli waris saja. Hal seperti ini dapat dijumpai pada pewarisan terhadap karang desa pada masyarakat Bali.

Dari ketiga sistem kewarisan yang ada itu bila dihubungkan dengan sistem kewarisan yang terdapat di Bali maka akan dapat dijumpai ketiga jenis daripada sistem kewarisan itu, dengan sedikit ada variasinya. Hal ini disebabkan oleh Desa, Kala, Patra, atau macam/jenis daripada harta warisan tersebut. Sebagai contoh dapat dilihat adanya hak mayorat pada seorang anak terhadap jenis harta warisan yang berstatus tanah ayahan desa. Demikian juga halnya dengan sistem kewarisan kolektif yang akan dapat dijumpai pada pewarisan terhadap harta warisan yang mempunyai nilai religiomagis seperti pewarisan terhadap tempat pemujaan, sanggah pemerajaan dan alat-alat upacara lainnya.

Sedangkan mengenai kewarisan individual dapat dijumpai dalam hukum kewarisan adat waris Bali ini, dimana sering dilihat harta warisan yang dibagi-bagikan secara merata diantara para ahli waris sebagaimana umumnya ditemukan dalam masyarakat adat di Bali.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang harta warisan, maka terlebih dahulu akan ditinjau beberapa pendapat dari para sarjana tentang pengertian hukum waris adat.

R. Soepomo memberikan pengertian tentang hukum adat waris sebagai berikut :

Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperasikan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunannya.³⁰

Kemudian B. Ter Haar Bzn, memberikan batasan :

Hukum waris adat itu meliputi aturan-aturan hukum yang bertalian dengan proses dari abad ke abad yang menarik perhatian, ialah proses penerusan dan pertalian kekayaan materielel dan immaterielel dari turunan ke turunan.³¹

Selanjutnya Iman Sudiyat berpendapat bahwa hukum waris adat meliputi peraturan atau pengoperan dan peralihan atau perpindahan harta kekayaan materiil dan non materiil dari generasi ke generasi.³²

³⁰ R. Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hlm. 81-82.

³¹ Ter Haar Bzn, *Op. cit.*, hlm. 231.

³² Imam Sudiyat, *Hukum Adat Satu*, Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, Yogyakarta, 1973, hlm 49.

Berdasarkan batasan-batasan yang diberikan oleh para sarjana tersebut di atas, dapat ditarik unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian hukum waris adat, yaitu :

1. Adanya Pewaris
2. Adanya Harta Warisan
3. Adanya Ahli Waris
4. Adanya Proses Pewarisan

Ad. 1. Adanya Pewaris

Adanya seorang yang meninggalkan harta warisan atau dapat dikatakan pewaris adalah orang yang menyerahkan harta kekayaannya pada orang dari generasi berikutnya.

Ad. 2. Adanya Harta Warisan

Mengenai pengertian daripada harta warisan di dalam hukum adat dan hukum Hindu dikenal dengan banyak istilah. Di dalam buku agama yang dipergunakan sebagai sumber daripada hukum adat Bali, harta warisan disebut : *"Druwe Tatamiyan"*.

Druwe Tatamiyan ini terdiri dari dua kata yaitu : *"Druwe"* yang berarti hak milik dan *"Tatamiyan"* yang berarti pusaka atau warisan atau peninggalan. Dengan demikian, maka Druwe Tatamiyan adalah peninggalan hak milik dari seorang yang telah meninggal kepada sanak keluarganya yang masih hidup.

Sehubungan dengan pengertian harta warisan , V. E. Korn berpendapat yang dimaksud dengan harta warisan menurut Hukum Adat Bali, adalah semua harta kekayaan baik materiel (yang berwujud) yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli warisnya.³³

Dari pengertian tersebut di atas, yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris, harta mana terdiri dari hak milik pewaris yang diperoleh selama perkawinannya, harta yang dibawa ke dalam perkawinannya baik yang bernilai religius maupun yang tidak bernilai religius, baik yang nyata maupun yang tidak nyata, hutang-hutang serta segala hak dan kewajiban pewaris yang diwariskan kepada ahli warisnya yang berhak dan wajib menerimanya.

Wujud harta warisan tersebut terdiri dari :

1. Harta Pusaka
 - a. Harta pusaka yang dapat diibagi yaitu harta warisan yang tidak mempunyai nilai magis religius seperti sawah, ladang dan sebagainya.
 - b. Harta pusaka yang tidak dapat dibagi adalah harta warisan yang mempunyai nilai magis religius seperti merajan.
2. Harta Bawaan
Yaitu harta yang dibawa oleh mempelai wanita maupun oleh mempelai laki-laki ke dalam perkawinan seperti jiwa dana
3. Harta Perkawinan
Yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan
4. Hak yang Didapat dari Masyarakat

³³ V. E. Korn, *Hukum Waris Bali*, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Universitas Udayana, 1972 (Selanjutnya disebut V. E. Korn II), hlm. 46.

Contoh : Bersembahyang di Khayangan Tiga mempergunakan kuburan dan lain-lain, melakukan upacara pitra yadnya.³⁴

Mengenai harta perkawinan menurut K. Wantjik Saleh menyatakan :

Bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, kalau suami istri masing-masing membawa harta benda ke dalam perkawinannya atau dalam perkawinannya itu memperoleh harta karena hadiah atau warisan, maka harta tersebut tetap masing-masing menguasainya kecuali kalau ditentukan untuk dijadikan harta bersama. Tentang harta bersama baik suami atau istri dapat mempergunakannya dengan persetujuan salah satu pihak, sedangkan mengenai harta bawaan suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya masing-masing atas harta bendanya.³⁵

Harta yang diperoleh suami istri sebelum perkawinan baik harta, jiwa dan tatadan mempunyai arti penting bila terjadi perceraian, maka harta yang diperoleh. Selama harta itu ada atau utuh dapat dibawa oleh pemiliknya.³⁶

Selanjutnya harta perkawinan menurut adat lazimnya dapat dipisahkan dalam 4 (empat) golongan yaitu :

- a. Barang-barang yang diperoleh suami atau istri secara warisan atau penghibahan dari kerabat (famili) masing-masing dan dibawa ke dalam perkawinan.
- b. Barang-barang yang diperoleh suami atau istri untuk diri sendiri serta atas jasa diri sendiri sebelum perkawinan atau dalam masa perkawinan.
- c. Barang-barang yang dalam masa perkawinan diperoleh suami istri sebagai milik bersama.
- d. Barang-barang yang dihadiahkan kepada suami dan istri bersama pada waktu pernikahan.³⁷

³⁴ *Ibid*, hlm. 46 – 47.

³⁵ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, 1976, hlm. 35.

³⁶ I. B. Ngurah Adhi, *Harta Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali*, Warta Hindu Dharma, 1990, hlm. 6.

³⁷ Surojo Wignyodipuro, *Op. cit.*, hlm. 183 – 184.

Di dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, harta perkawinan ini disebutkan dalam Pasal 35.

Pasal 35 ayat (1), menentukan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sedangkan ayat (2), harta benda dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Jadi Undang-undang Perkawinan mengenai 2 (dua) jenis harta perkawinan yakni harta bersama, yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan dan harta bawaan yaitu harta yang dibawa oleh masing-masing pihak suami istri sebagai hadiah maupun warisan.

Sedangkan menurut Hukum Adat Bali, harta dalam perkawinan terdiri :

- a. Harta Guna Kaya
- b. Harta Jiwa dana
- c. Harta Tatadan
- d. Harta Druwe Gabro

Ad. a. Harta Guna Kaya

Harta Guna Kaya ialah harta yang didapat oleh masing-masing dari suami atau istri atas cucuran keringat (jerih payah) sendiri masing-masing sebelum jenjang perkawinan.

Ad. b. Harta Jiwa Dana

Harta Jiwa Dana ialah harta yang diberikan oleh orang tua secara tulus ikhlas kepada anak-anaknya baik laki-laki ataupun perempuan semasa masih hidup kumpul dengan pewaris, sebelum masuk perkawinan (barang asal hadiah di Jawa).

Ad. c. Harta Tatadan

Harta tatadan adalah pemberian kepada anak wanita pada waktu perkawinannya (kawin keluar) dilangsungkan.

Ad. d. Harta Druwe Gabro

Harta druwe gabro ialah harta yang diperoleh suami dan istri dalam perkawinan dan lebih-lebih harta yang diperoleh suami dan istri dengan cucuran keringat bersama.³⁸

Ad. 3. Adanya Ahli Waris

Mengenai ahli waris dapat dikatakan bahwa pada prinsipnya adalah mereka yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, orangnya bisa laki-laki dan juga bisa perempuan tergantung dari sistem kekeluargaannya yang dianut masyarakat setempat.³⁹

³⁸ K.R.M.H. Soeripto, *Hukum Adat Waris Bali*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, 1979, hlm. 109.

³⁹ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 7.

Bahwa tampilnya ahli waris pada dasarnya adalah karena meninggalnya pewaris. Dari hasil diskusi hukum adat di Bali dengan tema pokok-pokok kedudukan wanita dalam hukum waris menurut hukum adat Bali telah ditentukan bahwa yang dikatakan ahli waris adalah :

- a. Setiap laki-laki dalam hubungan purusa selama tidak terputusnya haknya untuk menerima warisan.
- b. Setiap sentana rajeg selama tidak terputus haknya untuk menerima warisan.

Bagaimana halnya kalau dalam keluarga tidak mempunyai anak laki-laki melainkan hanya mempunyai satu anak perempuan saja, maka diperkenankan untuk mengangkat status anak perempuan tersebut menjadi laki-laki.

Terhadap keluarga yang tidak mempunyai anak baik laki-laki maupun perempuan, maka diperkenankan untuk mengangkat anak yang kemudian dijadikan keluarga sendiri.

Ad. 4. Adanya Proses Pewarisan

Proses Pewarisan merupakan suatu proses penerusan dan pengoperan barang-barang harta keluarga kepada turunan keluarga itu. Pada prinsipnya, pewarisan menurut hukum adat adalah beralihnya harta baik materiil (benda) maupun immaterial (gelar-status) dari suatu generasi tertentu kepada generasi lain yang menyusulnya.⁴⁰

⁴⁰ Irma Setyowati, *Beberapa Aspek Kewarisan Pada kekerabatan Materilinal (Suatu Tinjauan Pada Masyarakat Adat Minangkabau)*, Universitas Diponegoro, 1994, hlm. 43.

Pada dasarnya bila mendengar kata pewarisan maka akan terbayang adanya seseorang yang meninggal dunia, akan tetapi dalam proses pewarisan ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama, sehingga proses tersebut sudah dimulai pada waktu orang tua (pewaris) masih hidup. Selanjutnya proses tersebut berlangsung atau berlanjut setelah si Pewaris meninggal dunia dan biasanya sampai pada upacara pengabenan.

Dalam suatu keluarga yang terdiri suami istri dan anak-anaknya, sering terjadi saling memberikan barang-barang yang tujuannya hanya untuk menyenangkan saja, sehingga orang yang menerima hak untuk memberikan barang yang diterimanya tersebut kepada siapa saja yang dia kehendaki. Oleh karena itu menurut hukum adat. Semua harta yang pernah diterima oleh ahli waris semasa pewaris masih hidup, haruslah diperhitungkan kembali, apabila si Pewaris meninggal dunia dan juga setelah dibuatkan upacara pembakaran mayat (ngaben).

Pada prinsipnya, menurut hukum adat Bali yang berhak menjadi ahli waris adalah anak laki-laki yang mempunyai hubungan darah terdekat dengan pewaris, melalui garis keturunan kepurusa. Dengan demikian yang pertama menjadi ahli waris adalah anak laki-laki, dan apabila tidak ada anak laki-laki, barulah pewarisnya boleh beralih yaitu jatuh kepada mereka yang hubungan darahnya melalui purusa, yaitu yang mempunyai hubungan terdekat dengan orang yang meninggal dunia (pewaris).

Hal tersebut di atas sesuai dengan pendapat dari Gde Panetja, dalam bukunya “Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali” yang menyatakan bahwa :

Jika golongan ahli waris kedua tidak ada, maka yang mendapat giliran ialah saudara laki-laki pewaris atau saudara perempuan yang telah ditentukan menjadi sentana, dan kalau mereka itu telah meninggal lebih dari pewaris, maka menurut asas penggantian hak mereka digantikan oleh anak atau keturunan lain kancang ke bawah.⁴¹

Dalam proses pewarisan ini perlu juga diketahui bahwa pada hakekatnya yang diwarisi oleh ahli waris itu tidak hanya hal-hal yang bermanfaat saja melainkan juga termasuk hutang-hutang dari si pewaris pun harus diwarisi oleh ahli waris tersebut, sehingga dalam proses ini akan lebih mudah untuk menentukan besarnya jumlah warisan yang akan diperoleh masing-masing ahli waris.

Pembagian harta warisan biasanya berjalan dengan rukun dalam suatu ramah tamah dengan memperhatikan keadaan yang istimewa dari tiap-tiap ahli waris. Misalnya dalam keluarga yang mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan, maka anak perempuan tidak mendapat bagian tertentu melainkan hanya mendapatkan sekedar untuk penghidupannya yang berupa barang bawaan (harta bawaan) yang diambil dari harta peninggalan tersebut, sedangkan untuk anak laki-laknya, karena dia merupakan satu-satunya ahli waris yang sah, maka berhak untuk mewaris harta yang bersifat materiil maupun immateriil.

⁴¹ Gde Panetja, *Op. cit*, hlm. 25.

Dari uraian di atas dapat diambil suatu kesimpulan dalam proses warisan bahwa seorang pewaris akan mewariskan harta kekayaannya kepada orang-orang (ahli waris) baginya mampu untuk memelihara dan melakukan kewajiban-kewajiban ayahnya (pewaris) terhadap desa/banjar dan juga yang akan mengabdikan orang tuanya, serta yang terpenting yaitu memelihara sanggahnya.

2.7. Kedudukan Sentana Nyeburin Dalam Hukum Adat Waris

Seperti telah dikemukakan di atas, bahwa masyarakat Hukum Adat Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal. Sebagai konsekuensi dengan dianutnya sistem kekeluargaan patrilineal tersebut, maka menurut Hukum Adat Bali yang dipandang sebagai ahli waris biasanya anak laki-laki bukan anak perempuan, kecuali anak perempuan yang berstatus sebagai Sentana rajeg. Sedangkan mereka yang berkedudukan sebagai predana tidak berhak sebagai ahli waris.

Untuk masyarakat adat di Bali, salah satu dasar yang dapat dipakai petunjuk bahwa Hukum Adat Waris di Bali itu pada dasarnya bersumber pada Hukum Hindu.

Dengan ketentuan tersebut di atas sebagai ahli waris adalah anak kandung laki-laki atau keturunan laki-laki itu :

1. Anak angkat laki-laki
2. Anak kandung perempuan yang ditetapkan sebagai anak laki-laki (biasanya anak perempuan tunggal) yang disebut *Sentana Rajeg*.

Namun adakalanya anak laki-laki juga tidak menjadi ahli waris, yaitu dalam hal sebagaimana telah dikemukakan di atas :

1. Anak laki-laki yang diangkat menjadi anak angkat oleh keluarga lain
2. Anak laki-laki yang kawin nyeburin
3. Anak laki-laki yang tidak melaksanakan dharmaning anak, yaitu :
 - a. Durhaka terhadap orang tua
 - b. Durhaka terhadap leluhur.

Jadi disini jelas bahwa sebagai salah satu dasar yang dapat dipakai petunjuk bahwa Hukum Adat Waris di Bali itu pada dasarnya bersumber pada Hukum agama Hindu. Hal ini terlihat pada ketentuan Pasal 104, Manawa Dharma Sastra, seperti tersebut di bawah ini :

“Setelah meninggal ayah dan ibu, saudara-saudara (laki) setelah berkumpul bersama mereka boleh membagi harta (orang tua), sesungguhnya tidak ada kekuasaan atas harta itu selagi orang tua mereka masih hidup.”⁴²

Dari ketentuan tersebut di atas, dapatlah diketahui dengan jelas bahwa anak laki-lakilah yang merupakan ahli waris dan bukan anak perempuan. Walaupun anak perempuan (predana) bukan sebagai ahli waris, namun terhadap Hukum Adat Waris Bali ini terdapat suatu terobosan. Dimana semasih orang tuanya hidup, anak perempuan yang kawin keluar itu dapat dibekali harta benda/kekayaan yang didasari atas keikhlasan serta terlepas dari kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan karena diterimanya bekal tersebut.

⁴² I Gede Pudja dan Tjok Rai Sudharta, *Op. cit.*, Hlm. 555.

Pemberian bekal ini disebut “*jiwa dana*” yang dapat dilaksanakan sepanjang tidak merugikan ahli waris, yaitu dapat diberikan maksimal sepertiga bagian dari seluruh harta kekayaan.⁴³

Menurut Hukum Adat Waris di Bali, terdapat tiga garis keutamaan dalam menentukan ahli waris, yaitu;

1. Garis keutamaan pertama

Dalam hal ini yang mendapat prioritas pertama sebagai ahli waris adalah anak kandung laki-laki atau sentana dari si pewaris. Jadi yang menduduki prioritas utama sebagai ahli waris adalah anak kandung laki-laki/sentana, atau anak angkat/sentana peperasan, atau sentana rajeg.

2. Garis keutamaan kedua

Menurut garis keturunan kedua, kalau turunan pewaris lurus ke bawah tidak ada, maka yang berhak mewaris adalah mereka yang menduduki garis lurus ke atas yaitu ayah/ibu sebagai golongan ahli waris kedua. Dalam hal ini jika yang masih hidup hanyalah ibunya saja, maka ibu bukanlah sebagai ahli waris, namun hanya dapat menikmati dan mengambil hasil dari harta warisan anaknya, karena ia berkedudukan sebagai seorang janda.

3. Garis keutamaan ketiga

Golongan ahli waris ke tiga ini akan ada bila golongan pertama dan kedua tidak ada. Yang termasuk golongan ketiga ini adalah saudara laki-laki

⁴³ Sagung Ngurah dan Ni Nyoman Sukerti, *Op. cit.*, hlm. 46.

pewaris, atau saudara perempuan yang telah ditetapkan sebagai sentana (sentana rajeg) atau kalau mereka itu telah meninggal lebih dulu dari pewaris, maka menurut asas penggantian hak, mereka akan digantikan oleh anak atau keturunan lain lurus ke bawah.

Jadi ahli waris menurut Hukum Adat Waris Bali adalah dapat disebutkan secara hirarkis, yaitu seperti tersebut di bawah ini :

1. Sentana (Anak laki-laki)
2. Sentana rajeg (anak perempuan, biasanya anak perempuan tunggal yang diangkat statusnya dari status predana menjadi purusa)
3. Sentana peperasan (anak angkat)
4. Kedua orang tua
5. Saudara laki-laki pewaris, atau saudara perempuannya yang telah ditetapkan sebagai sentana.
6. Turunan lurus ke bawah dari saudara laki-laki atau saudara perempuan.

Dari keseluruhan uraian di atas, akan nampak bahwa di dalam masyarakat hukum Adat Bali ahli waris memiliki hak untuk mewarisi harta warisan si pewaris. Namun disisi lain ahli waris harus menanggung beban kewajiban yang timbul dari proses pewarisan tersebut atau kewajiban yang dahulunya merupakan kewajiban si pewaris. Di dalam kewajiban ini adalah termasuk juga harta warisan yang bersifat negatif.

Jadi harta warisan yang merupakan bagian yang bersifat negatif ini lebih tepat dimasukkan atau disebut sebagai salah satu kewajiban daripada ahli waris,

karena didalam Hukum Adat harus dibedakan antara hak di satu sisi dan kewajiban disisi lainnya. Adapun hak daripada ahli waris menurut Hukum Adat Waris Bali, yaitu :

1. Hak untuk menguasai dan memiliki bagian dari harta warisan, dalam hal ini adalah harta warisan yang tidak bersifat/bernilai religius magis, seperti: sawah, kebun/tegalan, tanah pekarangan, emas dan lain sebagainya.
2. Hak untuk memakai, menikmati atau mengambil hasil dari harta warisan yang tidak dapat dibagi-bagi, karena sifatnya yang religius magis.

Kemudian kewajiban daripada ahli waris menurut Hukum Adat Waris Bali yaitu kewajiban untuk bersembahyang di Khayangan Tiga, mempergunakan kuburan serta melakukan upacara Pitra Yadnya.

Terhadap harta warisan yang merupakan pelaksanaan Pitra Yadnya seperti disebutkan di atas adalah lebih tepat disebut sebagai salah satu kewajiban daripada ahli waris dan bukan sebagai harta warisan.

Juga mengenai hutang-hutang si pewaris disebut sebagai harta warisan yang bersifat negatif dan akan dapat mengakibatkan adanya suatu kewajiban dari si ahli waris untuk melunasi hutang-hutangnya.

Jadi hak dan kewajiban merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena pada kenyataannya keduanya itu mempunyai hubungan sebab akibat, dimana setiap perolehan hak selalu akan diikuti dengan kewajiban, sebaliknya setiap kewajiban akan selalu disertai dengan hak.

Dari kondisi di atas dapat dinyatakan bahwa, pada dasarnya kewajiban-kewajiban ahli waris menurut Hukum Adat Waris Bali adalah sebagai berikut :

1. Melakukan upacara Pitra Yadnya sampai pada pengabenan (puput)

Dengan tujuan untuk kelanjutan kehidupan imaterial si pewaris di alam baka.

2. Membayar lunas hutang-hutang si pewaris
3. Memuja leluhur.

Dimana setelah upacara pengabenan dengan segala rentetan upacaranya telah selesai, maka roh si pewaris akan menjadi suci yang kemudian ditempatkan disanggah/pemerajan dan harus dipuja oleh ahli warisnya.

4. Disamping itu kewajiban dari ahli waris adalah sebagai berikut :

Memelihara dan melestarikan harta warisan yang bernilai religius magis, misalnya berupa tempat persembahyangan seperti : pura khayangan tiga, pura kawitan, sanggah/pemerajan, dan sebagainya.

5. Menjaga, memelihara dan mengusahakan dengan baik terhadap segala harta warisan yang tidak bernilai religius magis, dengan maksud agar harta warisan itu tidak disia-siakan oleh ahli waris.
6. Melakukan korban suci secara tulus ikhlas kepada keturunan, dengan maksud agar ahli waris memelihara dan menanggung kelangsungan hidup anaknya/keturunannya.

Dengan melihat uraian di atas barulah kita dapat melihat hak dan kewajiban dari sentana nyeburin. Hak dan kewajiban sentana nyeburin di Bali

akan kita jumpai beberapa variasi, hal ini bergantung dari desa, kala, patra, daerah setempat.

Dalam suatu peristiwa perkawinan Nyentana di Bali, si istri (sentana rajeg) berstatus purusa. Sedangkan si suami berstatus predana. Dalam hal putusnya perkawinan nyentana karena kematian si istri, maka si suami (sentana nyeburin) ini menjadi janda, yang dalam Hukum Adat Bali dikenal dengan istilah “*Balu*” (balu lanang). Apabila putusnya perkawinan nyentana itu karena perceraian (sapihan), maka si suami sentana nyeburin menjadi janda.

Putusnya perkawinan nyentana karena kematian si istri, maka sentana nyeburin (balu lanang), dapat saja menetap di rumah istrinya atau dapat juga kembali ke rumah asalnya. Tetapi kalau perkawinan nyentana itu putus karena perceraian (sapihan), maka biasanya sentana nyeburin (sapihan lanang) itu akan kembali ke rumah asalnya. Di bawah ini akan dibahas kedudukan, sentana nyeburin dalam Hukum Adat Waris yang berada di rumah istri dan kedudukan sentana nyeburin dalam hukum adat waris yang *mulih daha* (kembali ke rumah asalnya).

2.8. Pandangan Masyarakat Terhadap Perkawinan Nyentana

Dewasa ini perkawinan yang dipandang baik untuk dilakukan adalah perkawinan Asura Wiwaha yang dalam masyarakat lebih dikenal dengan sebutan kawin memadik/meminang.

Perkawinan yang lain masih ada dan dijumpai dalam masyarakat dalam bentuk Ghandarwa Wiwaha, namun menurut adat di Bali pada umumnya disebut dengan bermacam-macam istilah seperti : Merangkat/Ngelayat/Ngerorod. Selain kedua macam perkawinan yang telah disebutkan di atas. Adapula bentuk perkawinan lain yaitu perkawinan Nyentana yang masih dapat dilakukan, hal ini disebabkan adanya alasan-alasan, seperti : untuk meneruskan keturunan, mendapatkan tenaga ayahan untuk di Desa atau Banjar, akan tetapi perkawinan ini tidaklah umum dilakukan.

Mengenai perkawinan Nyentana, masyarakat Desa Adat Jegu memandang atau menganggap bahwa kawin Nyentana bukanlah merupakan suatu perkawinan yang umum dilakukan. Oleh karena dengan kawin Nyentana berakibat beralihnya status dari kedua mempelai. Terutama pihak laki-laki memutuskan hubungan kekeluargaan dengan keluarga asalnya. Disamping tidak memperoleh hak dan kewajiban sebagaimana seorang laki-laki di Bali umumnya yang menempati kedudukan yang sangat menentukan dalam suatu keluarga.

Dalam kenyataan perkawinan Nyentana ini masih tetap diakui dan dijumpai dalam masyarakat Desa Adat Jegu. Namun perkawinan ini sama dasarnya seperti perkawinan yang biasa dilakukan dalam masyarakat yaitu didasarkan atas suka sama suka diantara kedua belah pihak dan dilakukan oleh orang yang masih memiliki hubungan keluarga terdekat.

Jadi dapat dikatakan perkawinan Nyentana ini menurut pandangan masyarakat merupakan perkawinan yang kurang baik untuk dilakukan, karena

adanya perubahan status dari mempelai laki-laki terhadap keluarga asalnya. Namun kenyataannya masih ada yang melakukannya.

2.9. Hipotesis

Dari arti katanya hipotesis memang berasal dari 2 penggalan kata yaitu “hypo” yang artinya “di bawah” dan “thesa” artinya kebenaran. Jadi hipotesis yang kemudian cara penulisannya disesuaikan dengan Ejaan Bahasa Indonesia menjadi hipotesa, dan berkembang jadi hipotesis.⁴⁴

Hipotesis ini adalah dugaan yang bersifat sementara yang mungkin benar, atau mungkin juga salah. Dia akan ditolak jika salah atau palsu, dan akan diterima jika fakta-fakta membenarkannya.⁴⁵

Berdasarkan latar belakang dan tinjauan pustaka di atas maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Oleh karena status laki-laki di dalam perkawinan Nyentana telah berubah menjadi berstatus perempuan, maka apabila istri meninggal dunia oleh karena status hukumnya, ia hanya berkedudukan sebagai seorang janda.
2. Oleh karena laki-laki dalam perkawinan nyentana telah memutuskan hubungan hukum dengan keluarga asalnya (tinggal kedaton), maka hak untuk mewaris telah hilang.

⁴⁴ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, Cet. XI, 1998, hlm. 68.

⁴⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Andi, Yogyakarta, Cet. XXXII, 2001, hlm. 63.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penyusunan tesis ini, penulis menggunakan metodologi sebagaimana lazimnya suatu karya ilmiah untuk mendapatkan data sebagai bahan penyusunan tesis. Dalam hal ini perlulah diketahui terlebih dahulu cara-cara untuk menemukan dan mengembangkan suatu pengetahuan yang dilakukan dengan penelitian.¹

Cara yang digunakan, haruslah cara ilmiah yang berarti kegiatan penelitian ini didasari pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis.²

- Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia.
- Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan.
- Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.

Jadi metodologi penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari tata urutan peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian.

Adapun metodologi yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah sebagai berikut :

¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 15.

² Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, CV. Alfabeta, Bandung, Cet. IV, 2002, hlm 1.

3.1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis ini menekankan dari segi perundang-undangan dan peraturan-peraturan serta norma-norma hukum yang relevan dengan permasalahan ini. Sedangkan pendekatan sosiologis ini, menekankan pada permasalahan yang diteliti berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ada dan berkembang dalam masyarakat yang bersumber pada data primer.

3.2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dan lapangan, yang bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang, keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok dalam lembaga masyarakat.³ Sehingga dari penelitian ini menekankan kepada metode penelitian kualitatif. Metode ini lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan (*verstehen*), metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna dari suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri responden dalam metode ini berkembang terus (*snowball*) secara bertujuan (*purposive*) sampai pada data yang dikumpulkan dianggap memuaskan. Alat pengumpul data atau instrumen dalam metode ini ialah si peneliti sendiri. Jadi peneliti merupakan key

³ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, Cet. Ke IV, 2001, hlm. 5.

instrument dalam mengumpulkan data, si peneliti harus terjun sendiri ke lapangan secara aktif.⁴

Kalau dilihat dari tujuan penelitian ini merupakan penelitian yang verifikasi, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menguji kebenaran dari teori-teori yang telah dikemukakan oleh para sarjana atau para ilmuwan.

3.3. Sumber Data

Informasi atau data dapat dibedakan berdasarkan sumbernya, yaitu data primer : dari tangan pertama dan data sekunder : dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya.⁵

3.3.1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau sumbernya yaitu bertemu langsung dengan responden atau informan dari masyarakat yang berkaitan langsung dengan permasalahan tersebut.

3.3.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri oleh peneliti, karena data ini telah ada pada peraturan perundang-undangan, Awig-awig, buku-buku dan terbitan lainnya, yang tujuannya untuk mendapatkan landasan teori yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan.

⁴ *Ibid*, hlm. 81.

⁵ Marzuki, *Metodologi Riset*, PT. Prasetia Widya Pratama, Jogjakarta, Cet. ke IX, 2002, hlm. 55.

3.4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dipilih Desa Jegu, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, karena di Desa Jegu ditemukan adanya perkawinan Nyentana, yang perkawinan itu putus karena kematian dari seorang istri yang kedudukannya sebagai purusa dan perkawinan nyentana yang putus karena perceraian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Tabanan (Putusan terlampir).

Di Desa Jegu ini, berbatasan dengan Desa Rijasa, yang merupakan daerah kawasan pariwisata air panas, dan di bawah kaki gunung Batu Karu.

Desa Jegu dikepalai oleh Kepala Desa Dinas dan desa adatnya dikepalai oleh Bendesa Adat. Desa ini terdiri dari 9 Banjar/Dusun Dinas dan 9 Banjar adat yang setiap banjar/dinas dikepalai oleh Kelian Dinas. Sedangkan untuk setiap banjar adat dikepalai oleh Kelian Adat yang jumlah penduduknya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Jumlah Penduduk Desa Jegu

No	Banjar/ dusun	Jumlah penduduk (orang)	Jumlah Laki-laki (orang)	Jumlah Perempuan (orang)
1	Sigaran	490	162	199
2	Cepag	207	150	175
3	Bale	215	188	211
4	Pande	301	200	225
5	Tengah	472	171	213
6	Tegal	305	145	187
7	Bendul	498	179	237
8	Ngis Kelod	463	170	201
9	Ngis Kaja	485	210	213
		3.436	1.575	1.861

Sumber : Kantor Kepala Desa Jegu untuk tahun 2001

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, diperoleh data dengan cara sebagai berikut :

3.5.1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara mengadakan penelitian atau mempelajari peraturan perundang-undangan, Awig-awig, buku-buku, karya ilmiah dari para sarjana dan informasi lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

3.5.2. Survei Lapangan

Wawancara (interview) merupakan cara pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan kepada tujuan penelitian. Tanya jawab ini secara langsung dengan responden yang telah ditentukan atau pertanyaan yang sudah terstruktur. Untuk melengkapi pengumpulan data dengan daftar pertanyaan maupun wawancara tersebut dapat pula digunakan pengamatan (*observation*) dan penggunaan catatan harian.⁶

Wawancara pada responden itu menyangkut pada orang-orang yang telah melakukan perkawinan Nyentana lalu perkawinan itu putus, baik karena kematian maupun karena perceraian, dan yang menjadi nara sumber atau informan adalah tokoh masyarakat, pengurus desa adat, tokoh agama, aparatur pemerintah Kabupaten Tabanan.

⁶ Djarwanto, *Pokok-pokok Metode Riset dan Bimbingan Teknis Penulisan Skripsi*, Liberty, Yogyakarta, Cet. Ke I, 1984, hlm. 25.

3.6. Teknik Pengecekan Kebenaran Data

Dalam mengecek validitas data menggunakan tehnik triangulasi.

Menurut S. Nasution triangulasi data atau informasi dari satu pihak harus di cek kebenarannya dengan cara memperoleh data itu dari sumber lain, misalnya dari pihak kedua, ketiga dan seterusnya dengan menggunakan metode yang berbeda. Tujuan ialah membandingkan data tentang hal yang sama yang diperoleh dari berbagai responden/berbagai pihak agar ada jaminan mengenai tingkat kepercayaan data. Cara itu juga mencegah bahaya-bahaya subyektif.⁷

3.7. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Data yang diperoleh diolah secara kualitatif yaitu menghubungkan dan menilai data yang terkumpul serta menentukan ketepatan berbagai data dengan melakukan klasifikasi sesuai dengan jenisnya. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan jenis penelitian studi kasus dan lapangan yaitu yang bertujuan untuk menggambarkan dan juga untuk membuktikan hipotesa yang diajukan. Hasil dari data primer maupun data sekunder diolah di sajikan secara deskriptif analitis, yaitu dilakukan dengan jalan menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu dan dihubungkan dengan pendapat para sarjana untuk kemudian diambil kesimpulan secara umum.⁸

⁷ Nasution S, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 1992, hlm. 9.

⁸ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet. Ke XIII, 2002, hlm. 17.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Berangkat dari perumusan masalah Bab I, hasil penelitian ini akan mengungkapkan mengenai hak waris dari Sentana Nyeburin yang tetap tinggal di rumah almarhum istrinya dan hak waris dari Sentana Nyeburin yang kembali ke rumah asalnya.

Perkawinan Nyentana merupakan suatu bentuk perkawinan pengecualian daripada perkawinan yang umum dilaksanakan menurut hukum Adat Bali. Perkawinan Nyentana ini merupakan perkawinan yang jarang terjadi karena dalam hal ini status dari seorang laki-laki (purusa) berubah menjadi status predana (perempuan) begitu juga dari seorang perempuan (predana) berubah statusnya menjadi purusa.

Hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan responden bahwa menurut data yang ada baik itu data sebelumnya maupun data semenjak menjadi Bendesa Adat selama kurang lebih 40 tahun dari tahun 1967 sampai dengan sekarang (tahun 2002) telah terjadi lima kali perkawinan Nyentana pada warga desanya.¹

¹ Wawancara dengan Bendesa Adat Jegu pada tanggal 1 Agustus 2002

4.1.1. Mengenai Sentana Nyeburin yang Tetap Tinggal di Rumah Almarhum Istrinya (Kasus I)

4.1.1.1. Kasus Sentana Nyeburin yang tetap tinggal di rumah almarhum istrinya di Banjar Sigaran

Pada tahun 1955 telah terjadi perkawinan yang sah atau mesakapan secara Nyentana menurut Hukum Adat antara :

- a. N a m a : I Made Pugeh
- b. U m u r : 70 tahun
- c. Dalam keadaan : Janda (Balu Lanang)
- d. A l a m a t : Br. Sigaran Desa Jegu Kecamatan Penebel
Kabupaten Tabanan
- e. Pekerjaan : Petani

Identitas tersebut diatas atau Pihak Pertama berstatus Predana (Perempuan)

- a. N a m a : Ni Made Lodji (almarhum)
- b. U m u r : 65 tahun
- c. Dalam keadaan : Kawin
- d. A l a m a t : Br. Sigaran Desa Jegu Kecamatan Penebel
Kabupaten Tabanan

Identitas tersebut diatas atau Pihak Kedua berstatus Purusa (laki-laki)

Dimana upacara perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah pihak perempuan yaitu berupa upacara pembiakawonan dan kemudian diikuti oleh upacara Mekala-kalaan dan upacara pejamuan atau mejejamuan, yang

selanjutnya perkawinan tersebut disiarkan di Banjar, dan biaya ini biasanya dibiayai oleh pihak perempuan yang statusnya sebagai purusa (laki-laki). Disini pihak perempuan menyiapkan upacara mejejamuan yang selanjutnya dibawa ke pihak laki-laki yang berstatus sebagai predana.

Sampai pada tahun 1982 perkawinan mereka masih belum dikarunia seorang anak, dan pada tahun ini juga Ni Made Lodji meninggal dunia karena sakit dan diabenkan pada tahun ini juga. Sejak saat itu I Made Pugeh tetap tinggal tinggal di rumah almarhum istrinya.

4.1.1.2. Kasus Sentana Nyeburin yang tetap tinggal di rumah almarhum istrinya di Banjar Bendul

Pada tahun 1985 telah terjadi perkawinan yang sah menurut Hukum Adat Bali, identitas para pihak adalah sebagai berikut :

- a. N a m a : Ketut Suartha
- b. U m u r : 42 tahun
- c. Dalam keadaan : Janda (Balu Lanang)
- d. A l a m a t : Br. Bendul Kecamatan Penebel
Kabupaten Tabanan
- e. Pekerjaan : Wiraswasta

Identitas tersebut diatas atau Pihak Pertama berstatus Predana (perempuan)

- a. N a m a : Ni Luh Suwarni (almarhum)
- b. U m u r : 37 tahun

- c. Dalam keadaan : Kawin
- d. A l a m a t : Br. Bendul Kecamatan Penebel

Kabupaten Tabanan

Perkawinan Nyentana ini dianggap sah menurut Hukum Adat karena telah memenuhi syarat-syarat ketentuan Adat, yaitu :

- a. Adanya Sentana Rajeg yang berstatus sebagai purusa dan melakukan perkawinan keceburin oleh pihak laki-laki yang statusnya telah berubah menjadi predana.
- b. Telah dilaksanakan upacara mabiyakaonan dan upacara Mekala-kalaan.
- c. Adanya Tri Upa Saksi yaitu Dewa Saksi, Manusa Saksi, dan Butha Saksi.
- d. Adanya Kesiarang atau disiarkan di Bale Banjar
- e. Upacara Mepamit dari leluhur atau kawitan dari laki-laki yang berstatus predana (perempuan) tidak dilaksanakan karena laki-laki dan perempuan tersebut adalah tunggalang sanggah (satu leluhur), dimana rumah mereka masing-masing satu natah pekarangan yang hanya berbatasan pagar hidup (tanaman pagar). Karena ada kebiasaan bahwa Sentana Nyeburin ini diutamakan dari keluarga dekat atau satu Dadia.

Setelah perkawinan berjalan kurang lebih 10 tahun dari perkawinan mereka dikaruniai dua orang anak yaitu satu orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Yang laki-laki bernama I Gde Suardika yang lahir pada tanggal 2 Januari 1982, dan yang perempuan bernama Ni Luh Artini, yang lahir pada tanggal 1 April 1984.

Pada tahun 1995, istrinya yang bernama Ni Luh Suwarni meninggal dunia dan pengabenannya telah dilaksanakan oleh suami dan keluarganya. Semua biaya pengabenan diambil dari menjual sebagian harta peninggalan almarhum istrinya (purusa). Semenjak saat itu hingga saat ini (tahun 2002) Ketut Suartha masih tetap tinggal di rumah almarhum istrinya dan tetap melakukan ayahan desa atau Banjar karena tanah yang ditempati oleh mereka adalah merupakan tanah ayahan desa, tetapi bentuk ayahnya adalah ayahan Balu Lanang bukan sebagai ayahan arep atau penuh.

Mengenai Kasus di banjar Sigaran dan banjar Bendul, dimana mengenai Sentana Nyeburin yang tetap tinggal di rumah almarhum istrinya berstatus sebagai janda karena berstatus predana, dimana menurut Hukum Adat Bali seorang janda bukanlah sebagai ahli waris dari harta peninggalan suaminya baik Inmateriil dan Materiil sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 31 Juli 1967 No. 144/Pdt/1966. PN Denpasar tanggal 20 April 1970 No. 206/PTD/1968/Pdt.

Seorang laki-laki yang kawin Nyeburin dengan seorang wanita berkedudukan sebagai "Sentana Nyeburin" sehingga setelah wanita/istrinya meninggal, maka kedudukan laki-laki tersebut adalah hanya sebagai janda yang berbadan wanita.²

Menurut Soeripta, Janda di Bali bukan ahli waris terhadap harta almarhum suaminya, janda hanya berhak menikmati saja terhadap harta

² Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara, *Pembinaan Hukum/Yurisprudensi*, Cahaya Baru Denpasar, Tahun 1976, hlm. 59.

peninggalan suami dengan syarat :

- a. Setia melakukan dharmaning janda
- b. Tetap tinggal di rumah almarhum istrinya yang berstatus purusa.³

Hasil wawancara dengan responden bahwa seorang laki-laki yang berstatus predana dalam perkawinan Nyentana apabila istrinya meninggal yang berstatus purusa, maka laki-laki itu akan sebagai seorang janda dan tidak mewaris harta peninggalan suaminya, yang mewaris adalah keluarga dari pihak purusa.⁴

4.1.2. Mengenai Sentana Nyeburin yang Kembali Pulang ke Rumah Asalnya/Mulih Daha (Kasus II)

4.1.2.1. Kasus Sentana Nyeburin yang kembali pulang ke rumah asalnya/Mulih Daha di Banjar Pande

Pada tahun 1957 telah terjadi perkawinan yang sah atau Mesakapan secara Nyentana antara :

- a. N a m a : I Wayan Seregeg
- b. U m u r : 68 tahun
- c. Dalam keadaan : Balu Lanang (Sapihan)
- d. A l a m a t : Br. Pande Desa Jegu Kecamatan Penebel, Kab. Tabanan

³ Soeripto, *Hukum Adat Waris Bali*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, Cet. II, 1979, hlm. 147 – 148.

⁴ Wawancara dengan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tabanan, pada tanggal 2 Agustus 2002.

e. Pekerjaan : Petani

Identitas tersebut diatas atau Pihak Pertama berstatus Predana (Perempuan)

a. N a m a : Ni Wayan Rupeg

b. U m u r : 63 tahun

c. Dalam keadaan : Balu Luh (Sapihan)

d. A l a m a t : Br. Bebali Desa Berembeng, Kecamatan Selemadeg
Kabupaten Tabanan

e. Pekerjaan : Petani

Identitas tersebut diatas atau Pihak Kedua berstatus Purusa (laki-laki)

Dimana upacara perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah pihak perempuan dan dibiayai oleh pihak perempuan yang statusnya sebagai purusa (laki-laki). Setelah itu “Mejejamuannya” dilaksanakan di rumah laki-laki yang berstatus sebagai Predana (perempuan). Disini I Wayan Seregeg sudah melaksanakan upacara Mepamit di sanggahnya (Pura Keluarga) yang berarti telah memutuskan hubungan dengan leluhurnya atau kawitannya, ini berarti I Wayan Seregeg sudah tidak mempunyai hubungan waris dengan keluarga asalnya dan setelah itu I Wayan Seregeg melakukan upacara Mepejati di sanggah untuk masuk kepada keluarga Ni Wayan Rupeg dan leluhur Ni Wayan Rupeg menjadi leluhurnya. Perkawinan yang dilaksanakan menurut Hukum Adat telah dianggap sah dengan Surat Keterangan Kawin Nomor : 64/Pem/DB/III/2002, yang dibuat oleh Kepala Desa Berembeng dan Bendesa Adat Bebali serta diketahui oleh Camat Selemadeg (terlampir).

Sampai dengan tahun 1967 pasangan suami istri tersebut masih belum dikaruniai seorang anak, maka pada tahun 1967 atas kesepakatan bersama mereka mengangkat anak laki-laki yang bernama I Made Nantra berumur 7 tahun, pengangkatan anak ini dilakukan secara Hukum Adat. Pada tahun 1996 mereka berpisah ranjang (Pinisahken dening Dewa), dan bercerai di depan sidang Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 8 April 2002, Nomor 14/Pdt.6/2002/PN.TBN. Putusan perkawinan ini sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Semenjak tahun 1996 I Wayan Seregeg pulang ke rumah asalnya di Banjar Pande Desa Jegu Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan. Di rumah asalnya I Wayan Seregeg diterima secara sukarela oleh keluarganya dalam status sebagai seorang perempuan, maka ia hanya berhak menikmati harta kekayaan orang tuanya. Tetapi disini I Wayan Seregeg diberikan warisan berdasarkan atas kerelaan dan kesepakatan yang berdasarkan rasa keadilan dan rasa kasihan oleh para ahli waris yang berhak di rumah asalnya, yaitu sebidang tanah tegalan (ladang).

Bagi Sentana Nyeburin yang diterima kembali oleh keluarganya harus melapor kepada Kelian Adat, kemudian disiarkan di Banjar serta dibuatkan upacara Mepejati di sanggahnya.

4.1.2.2. Kasus Sentana Nyeburin yang kembali pulang ke rumah asalnya/Mulih

Daha di Banjar Ngis Kaja

Telah terjadi perkawinan sah atau Mesakapan tahun 1970 secara Nyentana menurut Hukum Adat antara :

- a. N a m a : I Wayan Restuha
- b. U m u r : 55 tahun
- c. Dalam keadaan : Balu Lanang (Sapihan)
- d. A l a m a t : Br. Ngis Kaja Desa Jegu Kecamatan Penebel
Kabupaten Tabanan
- e. Pekerjaan : Petani

Identitas tersebut diatas atau Pihak Pertama berstatus Predana (Perempuan)

- a. N a m a : Ni Nyoman Wedari
- b. U m u r : 50 tahun
- c. Dalam keadaan : Balu Luh (Sapihan)
- d. A l a m a t : Br. Ngis Kaja desa Jegu Kecamatan Penebel
Kabupaten Tabanan
- e. Pekerjaan : Petani

Identitas tersebut diatas atau Pihak Kedua berstatus Purusa (laki-laki)

Dimana upacara tersebut dilaksanakan di rumah Ni Nyoman Wedari yang berstatus sebagai Purusa (laki-laki), tetapi sebelumnya dilaksanakan upacara “Mepamit” oleh I Wayan Restu disanggahnya dimana hal ini merupakan pemutusan hubungan dengan leluhurnya atau kawitannya karena dalam hal ini

I Wayan Restu berstatus Predana (perempuan) dan akan masuk pada Kawitan dari Ni Nyoman Wedari yang berstatus sebagai Purusa (laki-laki).

Dengan putusnya hubungan ini, maka putus pula hubungan waris baik Inmateriil maupun Materiil dengan keluarga asalnya. Dalam perkawinannya dikaruniai dua orang anak laki-laki bernama I Wayan Palguna umur 20 tahun dan I Made Sujana umur 17 tahun. Karena adanya ketidakcocokan lagi antara I Wayan Restu dan Ni Nyoman Wedari, maka pada tahun 1998 perkawinan mereka putus karena perceraian yang telah sah menurut Hukum Adat, dimana I Wayan Restu pulang ke rumah asalnya tanpa membawa harta guna kaya/drue gabro, berhubung harta itu tidak ada.

Kepulangan I Wayan Restu yang berstatus sebagai perempuan (mulih daha) diterima dengan sukarela oleh keluarganya dan diberi tempat tinggal di tempat tinggal orang tuanya dahulu, berhubung tempat tinggal tersebut telah menjadi tempat tinggal saudara laki-lakinya yang tertua. I Wayan Restu sudah melapor kepada Kelian Adat dan telah disiarkan di Banjar dan telah dilakukan upacara Mepejati baik di rumah si istri dan di rumah asalnya. Karena syarat sahnya bagi seorang perempuan maupun laki-laki yang berstatus Predana atau perempuan harus disiarkan atau diumumkan di Bale Banjar, supaya perbuatan hukum yang merupakan mulih daha diketahui oleh masyarakat dan keluarganya.

Pada tahun 1990 atas kesepakatan para ahli waris yang berhak di rumah asalnya diberikan sebagian warisan dari orang tuanya berupa sebidang tanah dan bangunan yang semuanya itu telah menjadi Hak Milik dari I Wayan Restu.

Dimana rumah tersebut telah ditempati oleh I Wayan Restu sebagai tempat tinggal semenjak tahun 1990 hingga sampai saat ini. Pada tahun 2001 I Wayan Restu telah melakukan perkawinan biasa dengan cara memadik atau meminang dimana perkawinan ini dilakukan di rumah pihak laki-laki atau Purusa (I Wayan Restu) dan sebagai perempuan (Predana) yaitu Ni Luh Putu Sukerti. Disini status daripada I Wayan Restu yang dulunya sebagai predana semenjak dia melakukan perkawinan biasa dia telah berubah statusnya sebagai purusa.

Namun berdasarkan penelitian dua kasus diatas bahwa sentana Nyeburin yang pulang ke rumah asalnya dapat diterima dengan baik tetapi tidak dalam status ahli waris.

Menurut Ketut Artadi mengemukakan bahwa seorang laki-laki yang terlibat perkawinan Nyeburin menurut Hukum Adat di Bali, disebut Ninggal Kedaton dan oleh karenanya ia tidak lagi berhak untuk mewaris di rumah asalnya, walaupun nantinya ia kembali lagi maka haknya sudah tidak dikembalikan lagi.⁵

Wawancara dengan Responden bahwa sebagian harta warisan yang didapat oleh Sentana Nyeburin yang pulang ke rumah asalnya itu bukan karena haknya, tetapi hanya diberikan karena faktor belas kasihan dan rasa keadilan dari pihak keluarga.⁶

⁵ I Ketut Artadi, *Hukum Adat Waris Bali dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi*, Cet. II, Setia Kawan, 1984, hlm. 6.

⁶ Wawancara dengan Bendesa Adat Jegu, *Op. cit.*

Wawancara dengan responden bahwa jika Sentana Nyeburin itu pulang ke rumah asalnya dengan tanpa membawa harta atau tidak memiliki apa-apa lagi, maka biasanya Sentana Nyeburin diterima dengan baik oleh keluarga asalnya dan karena pergeseran waktu serta perkembangan jaman Sentana Nyeburin ini akan diberikan sebagian warisan saja.⁷

4.2. Analisa Terhadap Hasil Penelitian

4.2.1. Kedudukan waris Sentana Nyeburin yang tinggal di rumah almarhum istrinya

Kendatipun perkawinan menurut umat Hindu dimaksudkan untuk menjalin hubungan yang kekal abadi, namun kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi, seperti halnya suatu perceraian. Hal ini tergantung pada faktor manusia itu sendiri yang mengakibatkan putusnya perkawinan.

Mengenai kasus di banjar Sigaran dan banjar Bendul, putusnya perkawinan ini karena kematian dari pihak istri, sesuai dengan Pasal 38 sub a Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yaitu putusnya perkawinan karena kematian. Dimana istri ini berstatus sebagai purusa (laki-laki) dan pihak suami berstatus predana (perempuan), mengenai perubahan status ini bisa terjadi hanya jika para pihak melakukan perkawinan Nyentana. Apabila ditinjau dari sisi pihak laki-laki yang melakukan perkawinan ini, maka disebut perkawinan "Nyeburin" yang artinya "terjun" atau menerjunkan diri dari status yang

⁷ Wawancara dengan Kepala Sub. Bidang Pendataan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan.

berkedudukan sebagai purusa (laki-laki) mau berubah statusnya menjadi predana (perempuan). Sedangkan jika perkawinan ini dilihat dari sisi pihak perempuan, maka perkawinan ini disebut perkawinan “keceburin” yang berarti bahwa ia “diterjuni” atau meningkatkan status diri dari status predana (perempuan) menjadi purusa (laki-laki). Tetapi jika perkawinan ini ditinjau dari kedua belah pihak baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan, maka perkawinan ini disebut dengan perkawinan “Nyentana”.

Perkawinan Nyentana ini dianggap sah menurut agama Hindu di Bali, apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

Segala upacara perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah pihak perempuan, baik itu mengenai upacara “mebiyakaonan” maupun upacara mekalakalaan, adanya acara mejejamuan yang dilakukan di rumah tempat tinggal pihak laki-laki (suami) dimana semua bahan-bahannya disiapkan dan berasal dari pihak perempuan (istri), wajib/harus adanya upacara mepamit atau memutuskan hubungan hukum baik kepada keluarga maupun kepada kawitan (leluhur) yang dilakukan oleh pihak laki-laki, upacara ini dilakukan agar nanti tidak membingungkan atau menimbulkan kerancuan pada tatanan kawitan/asal-usul leluhur. Tetapi pada kasus di banjar Pande (kasus sentana nyeburin yang mulih daha) bahwa hal tersebut tidak dilakukan karena para pihak/mereka masih tunggalan sanggah (satu pura keluarga) berarti mereka ini masih ada hubungan keluarga.

Selanjutnya perkawinan nyentana ini, kesiarang (disiarkan) di banjar oleh Kelian Banjar atau oleh Bendesa Adat, dan dilakukan pencatatan pada kelihan banjar. Pada Kelian banjar pihak purusa, atau kelian banjar dimana mereka bertempat tinggal dan juga dicatat dalam buku register perkawinan oleh Bendesa Adat, lalu untuk selanjutnya diurus surat/akta perkawinan pada pegawai pencatat perkawinan pada kantor Catatan Sipil setempat (Kabupaten Tabanan). Hal ini dapat dilakukan oleh suami istri tersebut atau dilakukan oleh Kelian Banjar, Lurah, dan Bendesa Adat serta bisa juga oleh pihak lain. Tetapi hal tersebut diatas tidak dilaksanakan oleh para pihak yang melakukan perkawinan nyentana tersebut (dalam kasus ini).

Jika perkawinan Nyentana ini putus karena kematian dari pihak istri yang berstatus purusa, maka suami yang berstatus predana (perempuan) akan berkedudukan sebagai seorang janda dan menurut Hukum Adat di Bali, khususnya hukum adat waris yang berlaku di Desa Jegu, bahwa seorang janda bukanlah ahli waris dari harta peninggalan suaminya. Tetapi dia hanya mempunyai hak menikmati harta tersebut, sampai si janda tetap setia menjalankan dharmanya sebagai seorang janda. Janda mempunyai hak untuk tidak membagi harta peninggalan tersebut baik yang inmateriil maupun yang materiil kepada ahli waris yang berhak mewaris sampai janda tersebut meninggal dunia dan selesai diabenkan.

Hal ini mempunyai tujuan agar masa depan dan kehidupan janda tidak terlantar. Sampai saat ini tidak ada upaya atau suatu penerobosan yang khusus pada Hukum Adat Waris di Bali, agar seorang janda dapat sebagai ahli waris.

4.2.2. Kedudukan waris Sentana Nyeburin yang pulang (mulih daha) ke rumah asalnya

Sesungguhnya perkawinan menurut agama Hindu adalah ingin mewujudkan suatu kelanggengan sebagai suami istri dan perkawinan itu sendiri merupakan dharma, karena merupakan suatu lembaga untuk menjalankan segala bentuk yadnya. Oleh karena sebab itu perceraian dalam agama Hindu sangat dihindarkan, perceraian ini adalah perbuatan dosa, karena telah melanggar sumpah/janji perkawinan (samsakara).

Tetapi ada juga alasan-alasan agar perceraian itu dapat dilakukan baik itu alasan yang ada dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) maupun menurut agama Hindu dalam Kitab Hukum Menawa Dharma Sastra.

Jika perkawinan itu putus karena perceraian, kejadian tersebut setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sebaiknya dilakukan di depan sidang pengadilan, sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Setelah perceraian terjadi pada perkawinan Nyentana, biasanya

Sentana Nyeburin pulang kembali (mulih daha) ke rumah asalnya, yang diartikan bahwa seseorang pulang dalam arti status belum pernah kawin.

Laki-laki yang telah melakukan perkawinan Nyeburin menurut pendapat/teori yang dikemukakan oleh I Ketut Artadi bahwa telah putus hubungan hukum dengan keluarga asal, tetapi apabila sentana nyeburin ini pulang ke rumah asalnya menurut masyarakat adat Desa Jegu maka ia akan diterima secara sukarela oleh keluarganya dan akan diberikan sebagian warisan oleh keluarga yang berhak mewaris setelah terlebih dahulu melalui musyawarah keluarga. Sebagian warisan itu diberikan karena didasari oleh rasa kasihan dan rasa keadilan. Sentana Nyeburin ini mendapat sebagian warisan bukan karena haknya sebagai ahli waris tetapi karena pemberian dari keluarga yang berhak mewaris. Bagian warisan tersebut tidak ditentukan besar kecil persentasenya, atau sampai saat ini tidak ada aturan adat yang mengatur mengenai seberapa besar pemberian tersebut. Semua ini biasanya menurut Desa, kala, patra (tempat, waktu, dan keadaan).

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari penjabaran mulai dari Bab I hingga bab IV, maka permasalahan mengenai kedudukan Sentana Nyeburin menurut Hukum Waris Adat Bali di desa Jegu, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Kedudukan Sentana Nyeburin yang tinggal di rumah almarhum istrinya adalah sebagai seorang janda, karena berstatus predana (perempuan) dan janda tidak merupakan ahli waris bagi harta peninggalan istrinya yang berstatus purusa (laki-laki), janda hanya menikmati harta peninggalan istrinya (purusa) selama ia setia pada dharmanya. Disini janda mempunyai hak untuk tidak membagi harta warisan yang ditinggalkan istrinya (purusa) selama hidupnya demi untuk kelangsungan hidup si janda dan anak-anaknya.
2. Kedudukan Sentana Nyeburin yang pulang ke rumah asalnya adalah akan diterima oleh keluarganya, dan tidak sebagai ahli waris. Disini dia tidak mempunyai hak untuk mewaris baik harta Inmateriil maupun Materiil. Tetapi atas kesepakatan yang didasari atas rasa kasihan dan keadilan, maka oleh ahli waris yang berhak diberikan sebagian harta warisan mengenai jumlah bagian warisan yang diterimanya disesuaikan dengan desa, kala, patra (tempat, waktu dan keadaan).

5.2. Saran-saran

Berdasarkan penjelasan, uraian dan kesimpulan tersebut di atas, maka akan diajukan beberapa saran yang diharapkan ada manfaatnya antara lain :

1. Agar oleh Pemerintah, secepatnya dibuat Peraturan Perundang-undangan mengenai Hukum Waris yang berlaku secara universal (nasional) yang bercorak pada sistem kekeluargaan yang parental (sistem Bapak – Ibu)
2. Bagi masyarakat yang belum mengerti atau memahami mengenai prosedur pencatatan perkawinan, dalam hal ini perlulah diberikan pengertian dan penjelasan melalui penyuluhan di desa-desa oleh para pejabat yang berwenang yang terkait dengan pencatatan perkawinan sehingga dengan cara memberi pengertian dan penjelasan, maka secara langsung masyarakat tersebut akan bisa mengerti dan memahami mengenai prosedur pencatatan perkawinan.

Melalui pengertian dan penjelasan yang diberikan di masyarakat bagi pihak yang ingin mencatatkan perkawinannya tidak akan menemui suatu kesulitan dan memudahkan dalam mengurus akta perkawinannya.

3. Pada perkawinan yang putus karena kematian agar secepatnya melaporkan hal tersebut.

Kepada Kelian Banjar/Kelian Adat/Bendesa Adat dan kepada Kantor Kelurahan atau Kepala Desa untuk secepatnya diurus Surat Keterangan Kematian yang berguna di kemudian hari bagi para pihak ahli waris yang ditinggalkan.

4. Untuk membuat suatu ketentuan Adat mengenai waris tentang pemberian sebagian warisan kepada Sentana Nyeburin yang pulang ke rumah asalnya, dimana pemberian itu dilakukan atas kesukarelaan para ahli waris yang berhak mewaris untuk ditentukan besar prosentasenya.
5. Para praktisi hukum, tokoh masyarakat dan tokoh adat serta aparatur negara di Bali agar mengupayakan atau membuat suatu terobosan hukum terhadap kedudukan janda supaya termasuk dalam ahli waris, karena melihat peran/baktinya selama mendampingi suami (purusa).

5.3. Ringkasan

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jika dilihat dari batasan perkawinan menurut UU tersebut diatas, Pasal 1 yaitu untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Rumusan tadi jelas bahwa terwujudnya keluarga bahagia merupakan tujuan pokok perkawinan. Bahagia yang dimaksud adalah bahagia lahir batin.

Kebahagiaan dan kekekalan harus dibina sepanjang masa, kebahagiaan dalam keluarga tidak saja memupuk harta benda, tidak saja terpenuhi hubungan seks, tetapi terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani yang wajar.

Perkawinan diharapkan dapat melahirkan keturunan/anak. Anak inilah yang nantinya bertugas untuk melakukan Sradha (Pitra Yadnya) untuk menyelamatkan dan mendoakan agar leluhurnya mendapatkan jalan yang terang. Anak/keturunan merupakan kelanjutan siklus kehidupan keluarga, selain anak, keturunan adalah pelita kehidupan. Anak yang lahir dari keluarga yang baik mendapat julukan putra. Putra ini berasal dari kata “*put*” yang artinya neraka dan kata “*ra*” artinya menyelamatkan. Jadi putra artinya ia yang menyelamatkan orang tua/leluhur dari neraka. Oleh sebab itu sangat diharapkan dalam sebuah keluarga itu dapat melahirkan keturunan/anak.

Di Bali masyarakatnya menganut sistim kekeluargaan Patrilineal yaitu suatu bentuk pertalian darah yang menitikberatkan pada garis keturunan bapak/ayah. Dimana penerus keturunan ada dipihak laki-laki yang disebut Purusa sedangkan perempuan disebut Predana.

Dengan dianutnya sistim kebapaan, maka hal utama yang menonjol adalah anak laki-laki. Anak laki-laki inilah yang disebut Sentana yang berarti pelanjut keturunan. Jika suami istri hanya mempunyai keturunan/anak perempuan saja, maka mereka dapat menjadikan anak perempuan tersebut berstatus laki-laki (Purusa) yang selanjutnya sebut “Sentana Rajeg”. Anak perempuan yang telah menjadi Sentana Rajeg ini menjadi ahli waris dari orang tuanya, karena kedudukan hukumnya dari Predana menjadi Purusa dan melakukan perkawinan Nyentana.

Pada masyarakat Adat Bali dikenal 2 (dua) bentuk perkawinan, yaitu perkawinan biasa dan perkawinan Nyentana. Perkawinan biasa ini dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu :

- a. Memadik.ngidih (meminang)
- b. Mejangkepan/kepekardiyang
- c. Merangkat/ngelayat/ngerorod

Sedangkan perkawinan Nyentana merupakan perkawinan kebalikan dari perkawinan biasa, yaitu bahwa pihak laki-lakilah yang ditarik masuk pada rumpun pihak perempuan.

Pada masyarakat adat Indonesia banyak dikenal bentuk-bentuk perkawinan, yaitu :

- a. Bentuk perkawinan jujur, yaitu bahwa pihak perempuan masuk/ikut pada kekerabatan pihak laki-laki.

Bentuk perkawinan jujur dapat dibedakan menjadi : 1) Perkawinan mengabdikan; 2) perkawinan bertukar ; 3) perkawinan meneruskan ; 4) perkawinan mengganti ; 5) perkawinan ambil anak.

- b. Bentuk perkawinan Semendo, yaitu bahwa suami berada dibawah kekuasaan kerabat istri dan kedudukan hukumnya tergantung pada bentuk perkawinan Semendo yang berhak.

Bentuk-bentuk perkawinan Semendo : 1) Perkawinan Semendo Raja-raja; 2) Perkawinan Semendo Lepas; 3) Perkawinan Semendo Nunggu; 4) Perkawinan Semendo Anak Dagang; 5) Perkawinan Semendo Nyangkit.

Adapun syarat-syarat perkawinan pada masyarakat Hindu di Bali sekarang ini berpegang 2 (dua) aturan, yaitu UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang bersifat Nasional dan adat istiadat yang bersumber pada agama Hindu.

Persyaratan menurut adat istiadat yang bersumber pada agama Hindu yaitu :

a. Persyaratan secara batiniah adalah :

- Perkawinan hendaknya dilaksanakan cinta sama cinta
- Sebelum dilaksanakan perkawinan kedua calon mempelai harus memiliki keimanan yang sama (satu agama)

b. Persyaratan secara lahiriah adalah :

- Mengenai faktor usia
- Mengenai bibit, bebet, bobot.

Persyaratan perkawinan menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yaitu :

- a. Perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1))
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua (Pasal 6 ayat (2)).

Kalau dilihat mengenai sahnya suatu perkawinan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974, menentukan bahwa :

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk sahnya perkawinan menurut umat Hindu di Bali, apabila telah dilakukan upacara mebiyakaon (mekala-kala) dan adanya Tri Upa Saksi dan Puput oleh Ida Pedanda/Panditha.

Tidak selamanya tujuan dari perkawinan yang bahagia dan kekal itu sesuai dengan harapan, terkadang perkawinan itu dapat putus.

Menurut Pasal 38 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, perkawinan dapat putus karena : 1) Kematian; 2) Perceraian; 3) atas Keputusan Pengadilan. Sedangkan akibat hukum yang ditimbulkan dari putusnya perkawinan yaitu mengenai adanya pewaris, adanya harta warisan, adanya ahli waris dan adanya proses pewarisan.

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mengenai 2 (dua) jenis harta perkawinan yaitu harta bersama dan harta bawaan. Sedangkan menurut Hukum Adat Bali, harta dalam perkawinan terdiri : 1) Harta Guna Kaya; 2) Harta Jiwa Dana; 3) Harta Tatadan; 4) Harta Druwe Gabro.

Menurut Hukum Adat Waris di Bali, terdapat tiga garis keutamaan dalam menentukan ahli waris, yaitu :

- a. Garis keutamaan pertama, yaitu anak kandung laki-laki/sentana, atau anak angkat/sentana peperasan, atau sentana rajeg.
- b. Garis keutamaan kedua yaitu orang tua (ayah dan ibu)
- c. Garis keutamaan tiga yaitu saudara laki-laki pewaris atau saudara perempuan yang telah ditetapkan sebagai sentana rajeg, jika mereka telah meninggal

terlebih dahulu dari si pewaris maka digantikan oleh anak atau keturunan lain lurus ke bawah.

Hak dan kewajiban dari Sentana Nyeburin di Bali akan kita jumpai beberapa variasi, hal ini tergantung dari desa, kala, patra daerah setempat. Dalam peristiwa putusnya perkawinan Nyentana karena kematian dari si istri yang berstatus laki-laki (purusa) maka si suami yang berstatus perempuan (predana) akan berstatus sebagai seorang janda, dimana menurut hukum adat waris di Bali, bahwa seorang janda bukanlah ahli waris. Selanjutnya janda hanya berhak untuk menikmati hasil dan harta yang ditinggalkan oleh almarhum suaminya selama janda tersebut setia pada dharmanya sebagai janda.

Untuk putusnya perkawinan Nyentana, karena perceraian dimana biasanya sentana Nyeburin akan pulang ke rumah asalnya. Walaupun telah dikatakan sebagai tinggal kedaton, yang berarti telah putus hubungan hukum dengan keluarga asalnya, tetapi biasanya si Sentana Nyeburin ini diterima dengan suka rela oleh keluarganya, tetapi sebelumnya harus melapor terlebih dahulu pada Kelian Banjar atau Bendesa Adat dan selanjutnya akan disiarkan di Bale Banjar, maka perbuatan mulih daha itu dianggap sah menurut hukum.

Di desa Jegu, Sentana Nyeburin ini diberikan sebagian warisan yang tersisa/yang belum sempat dibagi diberikan secara suka rela dan atas dasar kasihan setelah diadakan musyawarah keluarga oleh para ahli waris yang berhak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arikunto, Suharsini. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. XI. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Arthayasa, I Nyoman dkk, 1998. *Petunjuk Teknis Perkawinan Hindu*, Paramita, Surabaya.
- Adhi, I. B. Ngurah. 1990. *Harta Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali*, Warta Hindu Dharma.
- Afandi, Ali. 1984. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Bina Aksara, Jakarta.
- Astiti, Tjok. Istri Putra. 1981. *Perkawinan Menurut Hukum Adat dan Agama Hindu di Bali*, Biro Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana, Denpasar.
- Artadi, Ketut. 1979. *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi*. Setia Kawan. Denpasar.
- Beni, I Wayan dan Sagung Ngurah. 1986. *Hukum Adat di Dalam Yurisprudensi*. Surya Jaya, Cet. II.
- Dirksen, Anak Agung Ngurah Gede. 1986. *Seri Hukum Perdata Hukum Perkawinan dan Permasalahannya*, Setia Kawan, Denpasar.
- Djarwanto. 1984. *Pokok-pokok Metode Riset dan Bimbingan Teknis Penulisan Skripsi*. Liberty. Yogyakarta.
- Hadi, Sutrisno. 2001. *Metodologi Research*, Cet. XXXII, Andi, Yogyakarta.
- Hadikusuma, Hilman. 1992. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Cet. I, Mandar Maju, Bandung.
- Imam Sudiyat, 1981. *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta.
- , 1973. *Hukum Adat Satu*, Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, Yogyakarta.

- Kaler, I Gusti Ketut. 1983. *Butir-butir Tercecer Tentang Adat Bali*. Bali Agung. Denpasar.
- , 1978. *Hukum Adat Kekeluargaan di Bali*, Terjemahaan I Gde Wayan Pangkat, Biro Dokumentasi & Publikasi FH Unud, Denpasar.
- Korn, V.E. 1972. *Hukum Waris Bali*, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Universitas Udayana, (Selanjutnya disebut V. E. Korn II).
- Kaleran, Anak Agung Ngurah dan I Gusti Oka, 1968. *Hukum Perkawinan Secara Adat dan Agama Hindu*. Denpasar.
- Marzuki, 2002, *Metodologi Riset*, PT. Prasetia Widya Pratama, Cet. IX, Jogjakarta.
- Ngurah, Sagung dan Ni Nyoman Sukerti, 1989. *Lembaga Jiwa Dana Sebagai Suatu Penerobosan Terhadap Hukum Adat Waris Bali*, Cet. XV. Kertha Patrika.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 2002. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Cet. I. PT. Abadi, Jakarta.
- Prakoso, Djoko dan I Ketut Murdika, 1987. *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Panitje, Gede. 1986. *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*. Guna Agung, Denpasar,
- Puja, Gede. 1977. *Hukum Kewarisan Hindu yang Diresipir Kedalam Hukum Adat Bali dan Lombok*. Junesco. Jakarta.
- , 1975. *Pengantar Tentang Perkawinan Menurut Hukum Hindu*, Mayasari, Cet. II, (selanjutnya disebut Gde. Pudja II).
- Puja, Gede dan Tjok Rai Sudartha. 1976-1977. *Manawa Dharma Sastra*. Junesco, Jakarta.
- Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara, 1976. *Pembinaan Hukum/Yurisprudensi*, Cahaya Baru Denpasar.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Asis Safiodin, 1979. *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni Bandung,.
- Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama*, Santika Darma, Bandung.

- Suryabrata, Sumadi, 2002, *Metode Penelitian*, Cet. XIII, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sugiono, 2002. *Metode Penelitian Bisnis*. CV. Alfabeta, Cet. IV, Bandung.
- Setyowati, Irma. 1994. *Beberapa Aspek Kewarisan Pada kekerabatan Materilinal (Suatu Tinjauan Pada Masyarakat Adat Minangkabau)*, Universitas Diponegoro.
- S, Nasution, 1992, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung.
- Sugangga, I.G.N. 1988. *Hukum Adat Waris Pada Masyarakat Hukum Adat yang Bersistem Patrilineal di Indonesia*, Semarang.
- Soekanto, 1985. *Meninjau Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar untuk Mempelajari Hukum Adat*, Cet. II, CV. Rajawali, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1985. *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Soepomo, R. 1983. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Saragih, Djaren. 1980. *Hukum Perkawinan Adat dan Undang-undang Tentang Perkawinan serta Peraturan Pelaksanaannya (UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975)*, Tarsito, Bandung,
- _____, 1980. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Cet. I, Tarsito, Bandung.
- S, Yulius *et. al.*, 1980. *Kamus Baru Bahasa Indonesia*, Usaha Baru, Surabaya.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta.
- Soeripto, 1979. *Hukum Adat Waris Bali*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember.
- Sutha, I Gede Ketut. 1976. *Jiwa Kekeluargaan Dalam Hukum dan Pembangunan*. Fakultas Hukum Universitas Udaya. Denpasar.
- Saleh, K. Wantjik. 1976. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia.
- Titib, I Made. 1996. *Perkawinan dan Kehidupan Keluarga Menurut Kitab Suci Veda*, Paramita, Surabaya.

Ter Haar Bzn, 1979. *Azas-azas dan Susunan Hukum Adat*, Cet. IV. Pradnya Paramita, Jakarta.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, 2001, *Metodologi Penelitian Sosial*, Cet. Ke IV, PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Wignjodipuro, Surojo. 1979. *Pengantar dan Azaz-azas*, Alumni Bandung.

Bali Post, 20 April 2002, hlm. 9

B. Undang-undang/ Peraturan Pemerintah

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975